

SKRIPSI

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN BANTUAN SOSIAL TUNAI DI
KANTOR KELURAHAN UJUNG BARU KOTA PAREPARE**



OLEH

MUHAMMAD ALIF RAHMAN NUR

NIM: 18.2800.048

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI PAREPARE**

2023

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN BANTUAN SOSIAL TUNAI DI
KANTOR KELURAHAN UJUNG BARU KOTA PAREPARE**



OLEH

**MUHAMMAD ALIF RAHMAN NUR
NIM : 18.2800.048**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Pengendalian Intern Bantuan Sosial Tunai di kantor kelurahan ujung baru kota parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Alif Rahman Nur

NIM : 18.2800.048

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat penetapan pembimbing Skripsi Fakultas

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag.

NIP : 19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.

NIP : 197209292008011 012



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



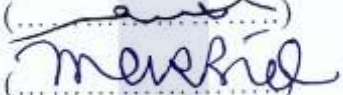




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 2001122 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Pengendalian Intern Bantuan Sosial Tunai di kantor kelurahan ujung baru kota parepare
Nama Mahasiswa : Muhammad Alif Rahman Nur
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2800.048
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2284/In.39.8/PP.00.9/7/2021
Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag.	(Ketua)	
Abdul Hamid, S.E., M.M	(Sekretaris)	
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag.	(Anggota)	
Dr.Arqam, M. Pd.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 2001122 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Sistem Pengendalian Intern Bantuan Sosial Tunai Di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare”. Penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan Skripsi ini telah banyak mendapat bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak secara tulus dan ikhlas hati. Secara khusus dan istimewa penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, Kepada Ayah dan Ibu saya Muhammad Nur B dan Harmini dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Hannani, dan Bapak Abdul Hamid selaku pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga meyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Parepare
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

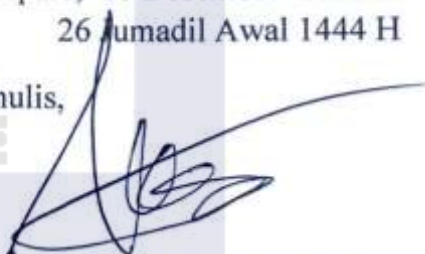
3. Ketua Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
4. Ibu An Ras Try Astuti, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.
5. Seluruh Staff Pegawai dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.
6. Staff dan Pegawai Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan saya yang mendukung saya dalam penulisan skripsi ini

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikannya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Desember 2022 M
26 Jumadil Awal 1444 H

Penulis,



Muhammad Alif Rahman Nur

NIM: 18.2800.048

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

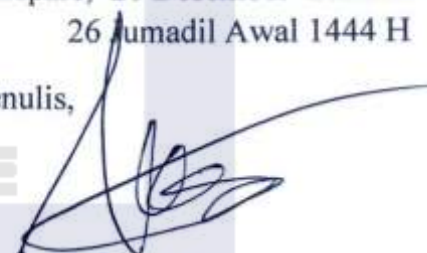
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Alif Rahman Nur
NIM : 18.2800.048
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 02 Januari 2001
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Sistem Pengendalian Intern Bantuan Sosial Tunai Di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Desember 2022 M
26 Jumadil Awal 1444 H

Penulis,



Muhammad Alif Rahman Nur

NIM: 18.2800.048

ABSTRAK

Muhammad Alif Rahman Nur. *Sistem Pengendalian Intern Bantuan Sosial Tunai Di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare* (dibimbing oleh Hannanidan Abdul Hamid).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian intern Bantuan Sosial Tunai Di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare dan juga untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial di Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deksriptif kualitatif . Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan fenomenologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

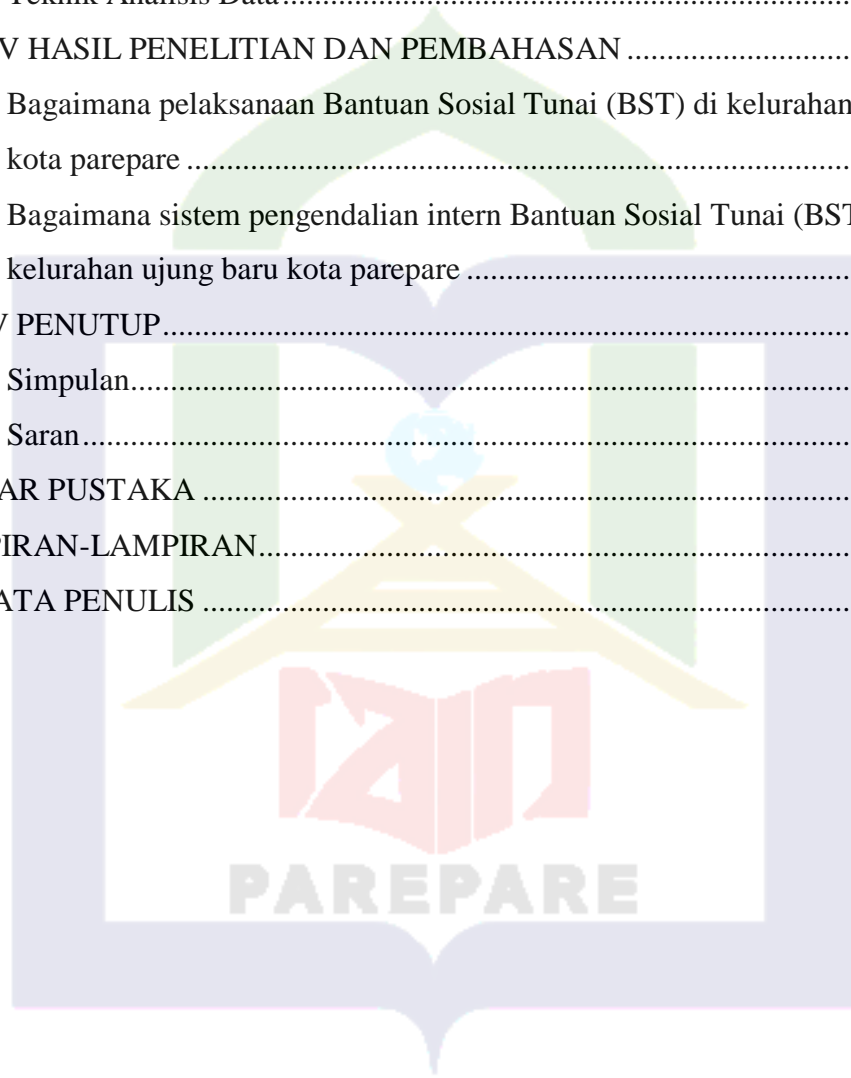
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern bantuan sosial tunai yang diterapkan di Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare adalah. dalam memperdayakan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 kementerian dinas sosial mengeluarkan program bantuan sosial tunai yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi. Kelurahan sebagai pihak pelayanan publik memiliki peran penting dalam proses penyaluran bantuan sosial tunai. Kelurahan ujung baru kota parepare berperan sebagai pihak yang mendata dan medeteksi masyarakat terdampak yang kurang mampu. Kelurahan ujung baru kota parepare dalam proses pendataan menggunakan sistem survei dan memberi edukasi dan pengetahuan bagi calon penerima bantuan terkait BST dan apa saja yang harus di lengkapi oleh calon penerima dalam sistem pengendalian intern bantuan sosial tunai (BST) sebagai media informasi kepada dinas sosial mengenai layaknya masyarakat sebagai penerima bantuan sosial Selain itu elemen-elemen sistem pengendalian intern juga berpengaruh yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Kata Kunci: Sistem, Pengendalian, Intern, Bantuan Sosial Tunai

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	14
B. Tinjauan Teori.....	16
1. Pengendalian Intern.....	16
2. Bantuan sosial tunai (BST).....	20
C. Tinjauan Konseptual.....	21
D. Kerangka Berfikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23

A.	Pendekatan dan jenis Penelitian	23
B.	Teknik pengumpulan data	26
C.	Teknik Pengolahan Data	27
D.	Uji keabsahan Data.....	29
5.	Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		33
A.	Bagaimana pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di kelurahan ujung baru kota parepare	33
B.	Bagaimana sistem pengendalian intern Bantuan Sosial Tunai (BST) di kelurahan ujung baru kota parepare	41
BAB V PENUTUP.....		60
A.	Simpulan.....	60
B.	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA		I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		IV
BIODATA PENULIS		XXIV



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Daftar Penerimaan Bantuan sosial Dari Kementerian Dinas Sosialis	35
4.2	Daftar Pengajuan Tambahan Penerima Bantuan Sosial dari Kelurahan	37



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Daftar Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	IV
2	Surat Ijin Melaksananakan Penelitian	V
3	Surat Ijin Penelitian dari pemerinta daerah kota parepare	VIII
4	Lampiran Sk. Pembimbing	IX
5	Dokumentasi	X
6	Dokumentasi wawancara	XI
7	Dokumentasi wawancara dengan penerima BST	XIII
8	Surat keterangan wawancara	XIV
9	Biodata penulis	XXIII

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka pikir	39



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عُدُّوْا : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḡilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../.: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

WHO menjelaskan bahwa corona adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus ini menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernafasan Timur tengah (*MERS-CoV*) dan sindrom pernafasan akut parah (*SARS-CoV*). Virus corona adalah *zoonotic* yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Penyebaran *virus corona* ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang terkonfirmasi terkena *virus coron*. Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada prekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, inventaris, dan pariwisata.¹

Pandemi COVID-19 yang berdampak buruk pada prekonomian Indonesia secara tidak langsung turut mempengaruhi naiknya angka pengangguran. Akibat pandemi wabah COVID-19 penerapan pemenuhan jarak sosial atau *physical distancing* sampai pada penghentian seluruh kegiatan ekonomi. Di Indonesia kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di laporkan telah membuat jumlah penduduk miskin meningkat. Laporan dari Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab Southeast Asia menyebutkan adanya peningkatan jumlah pengangguran sejak meluasnya COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. Situasi ini akibatnya banyaknya

¹Kurniawan, "Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Kota Palembang" Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2021), h.1

prusahaan atau usaha menengah terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Pekerja harian kehilangan mata pencahariannya. Penjual kehilangan pelanggannya.²

Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasunya yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia meningkat. Golongan rentan miskin dan hampir miskin yang bekerja di sektor informal dan mengandalkan upah harian akan sangat mudah kehilangan mata pencaharian dan jatuh ke bawah garis kemiskinan (CNBC Indonesia, 29 Maret 2020). Dengan berbagai masalah sosial ekonomi upaya pemerintah untuk menjaga dampak kebijakan pencegahan *Covid-19* dan berupaya untuk memulihkan kondisi, salah satunya dengan memberikan insentif sebagai stimulus bagi masyarakat yang terdampak pandemi agar dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa *Covid-19*. Hal ini dilakukan sampai ditingkat masyarakat terbawah atau desa melalui program jaring pengaman sosial.

Dimasa pandemi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa program-program perlindungan sosial yang salah satunya berupa bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak sosial ekonomi dari pandemi *Covid-19* ini. Salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah melalui kementerian Sosial adalah Program Bantuan Sosial Tunai atau BST.³

Program bantuan sosial tunai (BST) adalah bentuk program penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada masyarakat yang miskin. Program

²Silpa Hanoatubun, “Dampak *Covid-19* Terhadap perekonomian Indonesia”, *Edupscouns Jurnal*, Vol. 2, No. 1, (2020), h.147.

³Keputusan Direktur Jendral Nomor 18/6/SK/HK.02.02.4/2020 Tentang petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan *Covid-19*.

bantuan sosial masuk dalam kategori program perlindungan sosial. (wynandin ilmawan, 2008) program bantuan sosial tunai (BST) ini dikeluarkan demi membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi. BST adalah program bantuan pemerintah berupa uang tunai, baik bersyarat maupun tidak untuk, masyarakat yang mengalami kesulitan dalam ekonomi.

latar belakang program bantuan sosial tunai (BST) tidak lain dan tidak bukan hanyalah kemiskinan, faktor penyebab dari dampak yang ditimbulkan, terutama dalam sektor ekonomi itu sendiri, pandemi memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik hampir di seluruh negara termasuk indonesia. Sektor yang merasakan dampaknya yaitu sektor ekonomi, pelemahan sektor ini salah satu disebabkan dengan adanya kepanikan masyarakat. dampak pandemi COVID-19 pada sektor ekonomi di tandai dengan adanya penurunan daya beli di kalangan masyarakat yang mengakibatkan turunnya permintaan, berakibat timbulnya banyak kerugian bagi masyarakat kecil. Kejadian ini tentunya menambah tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Sehingga di perlukan kebijakan jangka pendek dari pemerintah untuk mencegah terdajinya peningkatan angka kemiskinan yang berdampak pada bidang sosial, ekonomi, dan politik. Negara maupun pemerintah merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam meletakkan dasar-dasar aturan yang mendukung dan dapat melindungi pertumbuhan dan aktifitas ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan juga tentunya mensejahterakan masyarakat. tanggung jawab pemerintah dalam perspektif islam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat umum.

Dana Moneter Internasional menyatakan bahwa ekonomi dan keuangan global saat ini sedang mengalami krisis akibat pandemi. Akibatnya virus ini telah mampu

melumpuhkan ekonomi seluruh negara. Bagi Indonesia, berdasarkan lembaga Analisis keuangan *Mody's* memprediksi adanya penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020, dari 4,9 % menjadi 4,8 % Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang berhenti sementara dan dan mengizinkan seluruh karyawan untuk sementara bekerja melalui rumah bahkan banyak juga perusahaan yang memberhentikan karyawannya dari pekerjaannya.

Karna kesulitan ekonomi di masa pandemi ini dapat menyebabkan masyarakat mengalami penurunan mekanisme pasar sehingga daya beli masyarakat menjadi berkurang. Berkurangnya daya jual dan daya beli menyebabkan laju perekonomian menurun. Perekonomian yang sehat memerlukan landasan hukum yang sehat pula. Peran landasan hukum dari perekonomian adalah memberikan struktur terprediksi dimana aktifitas pertukaran terjadi, berlangsung, dan berkembang. Persyaratan landasan hukum ini diperlukan, tidak peduli apakah perekonomian diorganisir dengan pola dimana pemerintah memegang peran kunci atau swasta yang menjadi aktor utama. Ketika pasar gagal menjalankan fungsinya pemerintah juga bisa dihadapkan pada kegagalan (kegagalan pemerintah, yang sifatnya kegagalan non pasar). Pemerintah melalui kementerian sosial memberikan bantuan atau Program BST kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dalam segi ekonomi guna meringankan beban masyarakat dimasa pandemi.

Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan yang berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak dari Wabah *Covid-19*. Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah pusat melalui kementerian

Sosial RI yang merupakan salah satu bentuk jaring pengaman sosial yang di berikan kepada Keluarga Penerima Manfaat.⁴

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat dengan nilai bantuan sebesar Rp. 600.000,-/bulan yang diberikan selama 3 bulan yaitu mulai dari bulan April sampai bulan juni 2020. Sasaran Bantuan sosial tunai yaitu 9 Juta KK di 33 Provinsi Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor (Kec. Cibinong, Gn.Putri, Kelapa Nunggal, Bojong Gede, Cileungsi, Jonggol dan Citerurup) karena wilayah tersebut menerima program Bantuan sosial Sembako. Kriteria penerima Bantuan Sosial Tunai adalah KK yang telah tercatat dalam Dalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementrian Sosial RI dan tambahan usulan dari daerah. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan melalui 2 cara yaitu pertama; Penyaluran dilakukan oleh Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) melalui rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Kedua; Penyaluran Bansos Tunai dilakukan oleh PT POS Indonesia melalui Salur BST (Bansos Tunai) di Kantor Pos, Salur BST di tingkat Komunitas, dan Salur Bansos Tunai langsung ke tempat tinggal.

Namun dalam menghindari penumpukan dan antrian panjang dalam proses penyaluran BST di beberapa daerah, Pihak PT. POS Indonesia secara serentak melaksanakan penyaluran di beberapa titik di setiap kecamatannya bekerjasama dengan pihak kecamatan dan kelurahan dengan menggunakan fasilitas antara lain kantor POS, Kantor kecamatan / lurah dan gedung sekolah. Untuk menertibkan penerapan protokol kesehatan PT. POS dalam proses penyaluran BST, PT. POS bekerjasama dengan aparat keamanan baik dari Kepolisian, TNI, Satpol PP, Satuan

⁴Keputusan Direktur Jendral Nomor 18/6/SK/HK.02.02.4/2020 Tentang petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan *Covid-19*.

Pengamanan serta aparat Pemerintah Desa/Lurah dan Kecamatan mengatur jalannya penyaluran sehingga *Physical Distancing* tetap terjaga, dan juga dalam hal tersebut semua yang hadir diwajibkan menggunakan masker serta petugas di haruskan menggunakan sarung tangan.

Surat Keputusan Direktur Jendral Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 tentang perubahan atas keputusan Direktur Jendral Nomor 18/6/SK/HK.02.02.4/2020 Tentang petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan *Covid-19* mengubah besaran nilai bantuan sosial setiap bulannya dan jangka waktu pemberian bantuan sosial tunai sebagai mana yang telah di tetapkan sebelumnya dalam surat keputusan Direktur Jendral Nomor 18/6/SK/HK.02.02.4/2020. Bantuan Sosial Tunai yang awalnya di berikan kepada KPM dalam periode bulan April – Juni 2020 dengan jumlah Rp. 600,000 per keluarga kemudian berubah menjadi pemberian bantuan sosial tunai dilaksanakan seja Bulan APRIL 2020 – Desember 2020 yang terdiri tahap I – IX. Demikian halnya dengan Besaran Nilai yang diberikan kepada KPM. Dimana Pemberian Bantuan Sosoal Tunai Sejumlah Rp. 600,000; perkeluarga untuk tahap I – III yakni Bulan April – Juni 2020 , dan sejumlah Rp. 300,000; perkeluarga untuk tahap IV-IX (Bulan Juni-Desember 2020).

Namun dalam pelaksanaannya, Penyaluran Bansos Tunai dibeberapa saerah memang kerap kali menemukan kendala terutama pada permasalahan data. Oleh sebab itu para petugas terkait khususnya *stakeholder*, masyarakat dan aparatur terkait perlu memahami betul syarat dan ketentuan dari penerima bantuan sosial Tunai. Ada beberapa kendala yang ditemukan di masyarakat seperti:

1. Data penerima bantuan sosial tunai yang masih timpang tindih dengan penerima bantuan lainnya seperti data penerima Bansos Tunai yang namanya juga

tercantum pada program BLT Desa atau program bantuan lainnya seperti PKH dan BPNT. Oleh sebab itu perlu diperhatikan bahwa data penerima Bansos tunai diberikan kepada mereka yang miskin yang terkena dampak/resiko Pandemi dan tidak masuk terdaftar pada penerima bantuan lainnya sehingga tidak ada penumpukan penerima bantuan. Terkait pihak mana yang berhak menerima, sepenuhnya disertakan kepada pemerintah Daerah.

2. Data yang digunakan bersumber pada data DTKS yang diperoleh dari kelurahan/desa melalui RT/RW. Seringkali RT/RW ataupun aparatur desa lupa memasukan data terbaru yang terkena dampak *Covid-19* seperti mereka yang kehilangan pekerjaan atau tidak bisa bekerja sehingga tidak ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan tapi tidak terdaftar.
3. Warga pendatang seperti mereka yang tinggal di kontrakan atau kos-kosan seringkali diabaikan oleh RT/RW dengan alasan KTP yang bukan asli wilayah tersebut. Warga pendatang yang tinggal dikontrakan atau kos-kosan yang terkena dampak *Covid-19* juga bisa mendaftarkan diri untuk menerima bantuan sosial dengan catatan tidak menerima program bantuan lainnya. Pendaftaran bisa dilakukan langsung ke kantor desa/kelurahan. Maslah diterima atau tidaknya akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas dari Dinas Sosial Kota/Kabupaten. Pendatang cukup membawa fotocopy KTP dan KK.
4. Permasalahan data yang seringkali menjadi masalah dimasyarakat adalah seperti ada masyarakat yang dianggap kurang mampu dan butuh dibantu tetapi tidak terdata sedangkan masyarakat yang dianggap mampu malah mendapatkan bantuan. Hal ini memang seringkali terjadi ketika menyalurkan bantuan. Hal ini

lumrah terjadi, karena kehidupan sosial dan perekonomian⁵ masyarakat seringkali dinamis. Bisa jadi dulunya ia masuk kategori miskin,⁶ kemudian menjadi mampu beberapa bulan kemudian ataupun sebaliknya yang dulunya mampu tapi kemudian jatuh miskin. Oleh karena itu kesadaran masyarakat yang sudah mampu yang dulu terdata, sebaiknya bisa melaporkan diri agar dirinya bisa dihapus dan digantikan dengan warga lainnya. Oleh sebab itu, tim verifikasi dan validasi data setiap daerah sangat berperan penting dalam menentukan kelayakan penerima manfaat agar tepat sasaran.

5. Permasalahan lain pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang jenis-jenis bantuan sosial dan kriterianya sehingga ada masyarakat yang menerima bantuan PKH tetapi merasa bertanya kenapa tetangganya dapat bantuan yang⁷ berbeda dari yang ia dapat. Kementerian Sosial telah mengeluarkan kebijakan berupa program bantuan berupa Program PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Bantuan Sembako (khusus Jabodetabek), Bantuan Sosial Tunai (BST) serta Bantuan Sosial dari kebijakan dan program Pemerintah daerah. Ada juga Program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT). Semua bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat miskin dan atau masyarakat miskin dan atau masyarakat yang terdampak *Covid-19* sesuai dengan kriteria masing-masing dengan catatan setiap KK hanya menerima satu program bantuan saja. Oleh sebab itu perlu adanya

⁵St. Syahrani, "Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh Kementerian Sosial RI Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Kabupaten Takalar", (Skripsi Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, th2021), h. 7.

penyebarluasan informasi terkait kriteria dan syarat-syarat penerima bantuan kepada masyarakat sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman.

Namun fakta dilapangan masih terjadi tumpang tindih data antara penerima bantuan sosial tunai dengan bantuan sosial lainnya seperti PHK dan BLT Dana. Tidak hanya itu, adanya masyarakat yang sama sekali tidak menerima bantuan sosial sedangkan masyarakat yang dimaksud masuk dalam syarat penerima bantuan sosial. dalam upaya penanggulangan masyarakat terdampak pandemi, melalui program bantuan sosial tunai. Pemerintah daerah khususnya kelurahan, di amanahkan langsung dari dinas sosial dalam rangka mendeteksi warga terdampak pandemi. Bahwa untuk melaksanakan jaring pengaman sosial sebagaimana di amanatkan dalam praturan pemerintah penganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19, perlu memberikan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai.

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang NO.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Berdasarkan undang-undang tersebut pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan praturan preundang-undangan bagi setiap warga negara penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁸

⁸Undang-undang Republik Indonesia No.25 tahun2009, Tentang Pelayanan Publik

Menyikapi segala kendala dan permasalahan yang terjadi memang dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah yang berperan penting dalam melancarkan penyaluran bantuan sosial ini agar tepat sasaran dan efisien.

Kota Parepare merupakan salah satu daerah di Indonesia yang juga ikut merasakan dampak dari pandemi COVID-19 yang sangat besar. Dampak dari COVID-19 di kota Parepare dapat dilihat dari banyaknya kios-kios pedangan kecil yang tutup, barang-barang kebutuhan sehari-hari yang langka, dan terjadinya penurunan daya beli di kalangan masyarakat. Dampak tersebut muncul dari adanya kebijakan pembatasan kerumunan masyarakat di tempat umum.

Pemerintah kota Parepare sendiri untuk mengatasi dan memperbaiki prekonomian daerah mulai menjalankan berbagai macam program pemulihan, salah satunya jenis program dari Kementerian Dinas Sosial yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST) pemerintah mengawali dengan bantuan dari kelurahan dengan melakukan pendataan dari kelurahan sebagai salah satu instansi pemerintahan yang menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat di Indonesia. Sebagai upaya untuk mematahkan masalah dan menyesuaikan target-target dan sasaran pemulihan termasuk sifatnya bantuan, pendampingan, maupun model-model pemberdayaan lainnya.

Kelurahan ujung baru Kota Parepare kecamatan soreang, Sulawesi Selatan, Indonesia yang berfungsi sebagai pihak pelayanan publik kelurahan ujung baru mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan wewenang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik tidak terlepas dari perwujudan pemerintahan yang baik,

terlebih pada wilayah kelurahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, keluhan-keluhan terhadap buruknya kualitas layanan di kelurahan menunjukkan bahwa belum terwujudnya pemerintahan yang baik dalam skala kelurahan.

Keberhasilan dana bantuan sosial tidak terlepas dari perhatian dan bantuan pemerintah. Pemerintah daerah memiliki peran sebagai pihak yang mendata masyarakat terdampak pandemi. Sebagai penyedia pelayanan publik kelurahan berperan penting untuk menyeleksi masyarakat, layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan sosial tunai agar dana tersebut bisa tepat sasaran sesuai dengan yang di sebutkan dalam peraturan pemerintah di atas sebagai pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020. Kementerian sosial memutuskan tentang pelaksanaan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak COVID-19. dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah di berikan keleluasaan untuk merancang dan menentukan jenis pelayanan bagi masyarakat. Di sisi lain kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang di berikan oleh penyedia layanan publik.

Membantu dan mengarahkan organisasi mencapai tujuan layanan yang di perlukan sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga organisasi bergerak menuju tujuan yang telah di tetapkan. Sistem pengendalian adalah suatu sistem yang dapat di terapkan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Jika organisasi memiliki sistem pengendalian, organisasi dapat mengantisipasi berbagai perubahan lingkungan yang terjadi, ekonomi islam juga hadis sebagai manifestasi untuk mewujudkan nilai-nilai agama dalam hal ekonomi (termasuk peran pemerintah dalam hal ekonomi). Islam mengusung konsep peran Negara di bidang ekonomi dengan basis nilai universal Islam seperti keadilan dalam bidang ekonomi yang tercermin

dalam mekanisme larangan riba, dan redistribusi pendapatan melalui zakat dan jaminan sosial.

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya aspek sosial, ekonomi dan politik dalam hal ini sebagai ajaran normatif, Islam juga berfungsi sebagai pedoman hidup bagi segenap para penganutnya. Dari hal ini, tentu saja Islam juga memiliki konsep ketatanegaraan yang berfungsi untuk merealisasikan kesejahteraan yang sinergis antara kepentingan dunia dan juga akhirat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, “Sistem pengendalian Intern Bantuan Sosial Tunai di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di kelurahan ujung baru kota Parepare
2. Bagaimana sistem pengendalian intern Bantuan Sosial Tunai di kelurahan ujung baru kota Parepare

C. Tujuan Penelitian

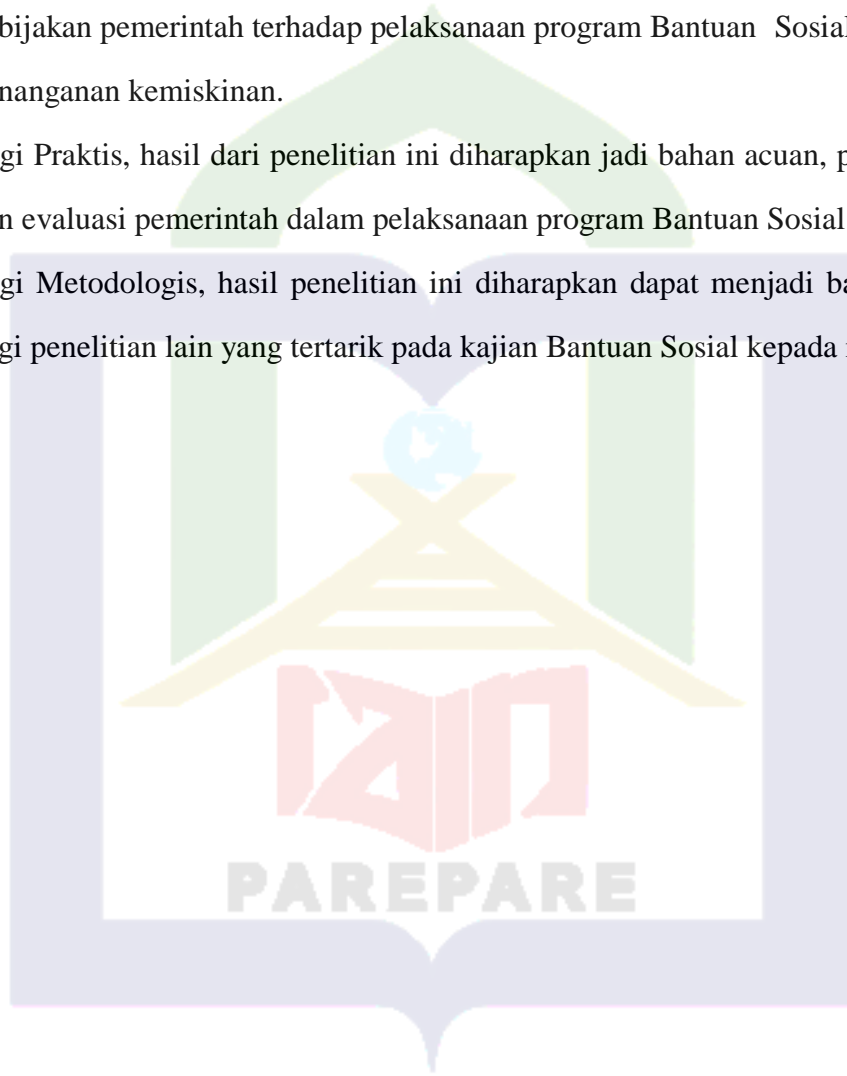
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di kelurahan ujung baru kota parepare?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Pengendalian Intern Bantuan Sosial Tunai (BST) di kelurahan ujung baru kota Parepare?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan Penelitian sebagai berikut:

1. Segi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya kajian yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan program Bantuan Sosial untuk penanganan kemiskinan.
2. Segi Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan jadi bahan acuan, pertimbangan dan evaluasi pemerintah dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial selanjutnya.
3. Segi Metodologis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian lain yang tertarik pada kajian Bantuan Sosial kepada masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berkaitan dengan penelitian “Sistem Pengendalian Itern Bantuan Sosial Tunai di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare” ini belum perna di lakukan oleh beberapa peneliti lain, tapi ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya:

Muthmainnah Indah Suci tentang Analisis Sistem Pengendalian Intern atas Biaya Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare. Tujuan penelitian ini pengendalian intern atas biaya pelayanan publik yang dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare. Subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Untuk mendapatkan data dengan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan penjelasan, observasi langsung untuk menghimpun data yang dibutuhkan dalam melakukan analisis, dan dokumntasi dengan melihat dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun metodologi penulisan melalui riset kepustakaan, dan riset lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan analisis kompratif. Teknik deskriptif yaitu dengan menggambarkan mengenai sistem pengendalian intern di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil.

Penelitian di atas menjelaskan tentang sistem pengendalian intern atas biaya pelayanan publik Dinas Kependudukan Catatan Sipil serta proses observasi untuk menghimpun data, sedangkan dalam penelitian yang akan di lakukan oleh penulis yaitu tentang sistem pengendalian Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk mengatasi

masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare.⁹

Penelitian yang di tulis oleh St.Syahrani yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Oleh Kementrian Sosial RI Terhadap Masyakat Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Takalar”. Hasil penelitian penulis tersebut menunjukkan bahwa penentuan atau syarat Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST).

Penelitian di atas menjelaskan tentang penentuan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tentang penentuan sekaligus penyesuaian data masyarakat yang layak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai di kelurahan ujung baru kota parepare.¹⁰

Penelitian yang di tulis oleh Nandya Chayah Rosadi, judul “Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kacamatan Suulun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan”. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Skripsi ini meliki persamaan dimana penelitian yang di bahas adalah tentang efektivitas sebuah program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat ditengah pandemi Covid-19.Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode

⁹Mutmainnah Indah Suci, “Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Biaya Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Parepare” (Skripsi Sarjana: Jurusan Akuntansi 2019), h. 2.

¹⁰St.Syahrani, “Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Oleh Kementrian Sosial RI Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Takalar” (Skripsi Sarjana: Jurusan Ilmu Pemerintahan makassar 2021), h. 2.

penelitian kualitatif.¹¹ Perbedaannya adalah, program yang diteliti adalah BLT Dana Desa dari Kementerian Desa bukan BST dari Kementerian Sosial.

Penelitian yang ditulis Hardiwidiansyah, judul “Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa” skripsi Program studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Skripsi ini membahas tentang dampak yang terjadi akibat pelaksanaan BLT pada masyarakat di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Persamaan yang ada dalam penelitian ini terletak pada metode pendekatan yakni sama-sama kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada¹² objek yang diteliti yakni antara BLT dan BST serta penelitian ini tidak difokuskan di masa pandemi.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahan objek penelitian.

1. Pengendalian Intern

a. Pengertian pengendalian intern

Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 (2008:2) pasal 1 ayat 1 (1) yang menegaskan bahwa: “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

¹¹Nindya Chyah Rosadi. “Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) pada masa Pandemi Covid-19 di perumahan Taman Chikandek, Jyanti Tanggerang”. (Skripsi)UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h.7.

¹²Ardi Widiannya “Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. (Skripsi UIN Alauddin Makassar, Makassar 2021). h. 2

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Menurut Mulyadi Pengertian Sistem pengendalian intern adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.¹³

Pengertian pengendalian intern menurut Hery adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalagunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.¹⁴

Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya manajemen yang telah ditetapkan.

b. Tujuan pengendalian intern.

Tujuan sistem pengendalian intern menurut UU No.60 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

¹³Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: Selemba Empat, 2013), h. 3.

¹⁴Hery, *Pengantar Akuntansi* (Indonesia: Gramedia Widiasarana, 2015), h 159.

Menurut Hery tujuan pengendalian intern tidak lain adalah:

- 1) Aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu (perorangan) oknum karyawan tertentu. Dengan demikian, pengendalian intern diterapkan agar supaya seluruh aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan, pencurian, dan penyalagunaan, yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan.
- 2) Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil resiko bai atas salah saji laporan keuangan yang disengaja (kecurangan) maupun yang tidak di sengaja (kelalaian).
- 3) Karyawan telah mentaati hukum dan peraturan
- 4) Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya suatu pengendalian intern adalah untuk memperkecil terjadinya kesalahan atau penyelewengan dapat segera diketahui dan diatasi.¹⁵

Sedangkan menurut Mulyadi tujuan dari sistem pengendalian intern yaitu:

- 1) Melindungi harta milik perusahaan
- 2) Memeriksa kecermatan dan kehandalan data akuntansi
- 3) Meningkatkan efisiensi usaha
- 4) Mendorong ditaatinya kebijakan yang telah digariskan.

c. Unsur-unsur Pengendalian Intern

Unsur-unsur yang membentuk suatu pengendalian intern merupakan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang berhubungan, yang diciptakan guna

¹⁵Hery, *Pengantar Akuntansi* (Indonesia: Gramedia Widiasarana, 2015), h 160.

membentuk suatu pengendalian intern yang memadai. Untuk dapat memberikan keyakinan bahwa tujuan Pemerintah Daerah dapat tercapai dengan baik maka pengendalian intern harus memiliki unsur-unsur yang memadai yang didesain sedemikian rupa untuk mendukungnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan terdiri dari lima unsur, yaitu:

- 1) Lingkungan pengendalian, adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian dalam instansi untuk menjalankan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dapat meningkatkan efektifitas sistem pengendalian intern.
- 2) Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang meliputi kegiatan identifikasi, analisis dan mengelola resiko yang relevan bagi proses atau kegiatan instansi
- 3) Prosedur pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif.
- 4) Informasi dan Komunikasi, dalam hal ini informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

5) Pemantauan adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindak lanjuti.¹⁶

2. Bantuan sosial tunai (BST)

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, masyarakat tidak mampu, kelompok rentan yang terkena dampak Covid-19, yang belum pernah menerima Bansos reguler, yakni Program keluarga harapan (PKH) dan Program sembako (<https://kemensos.go.id>, diakses pada tanggal 01 februari 2022). Tujuan dari program bantuan ini adalah guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi Covid-19. Adapun pandangan Islam terhadap kepercayaan dimana disebutkan dalam surat Al-Qashash :

الْمِثْقَالَ قَوْثَانٍ مِّنْ تَمَرٍ مِّنْخَيْرٍ تَاهُجِرُ اسْتَأْتِيَانَهُمَا إِحْدَانًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kita ambil sebagai pekerja adalah orang yang memiliki kemampuan dan terpercaya” (QS. Al-Qashash Ayat 26).¹⁷

Program BST dilaksanakan di seluruh Indonesia, kecuali Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, (meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan BodongGede, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta kota Bekasi. Pengecualian beberapa Kota/Kabupaten diatas kerana lokasi tersebut sudah diberikan Bantuan Sosial Sembako oleh Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial.

¹⁶Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: Selemba Empat, 2013), h 160.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-qashash, 2012), h. 388

Adapun regulasi mengenai Program BST , diatur dalam Keputusan Mensos No. 54/HUK/2020. Tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19.¹⁸

C. Tinjauan Konseptual

1. Pengendalian intern

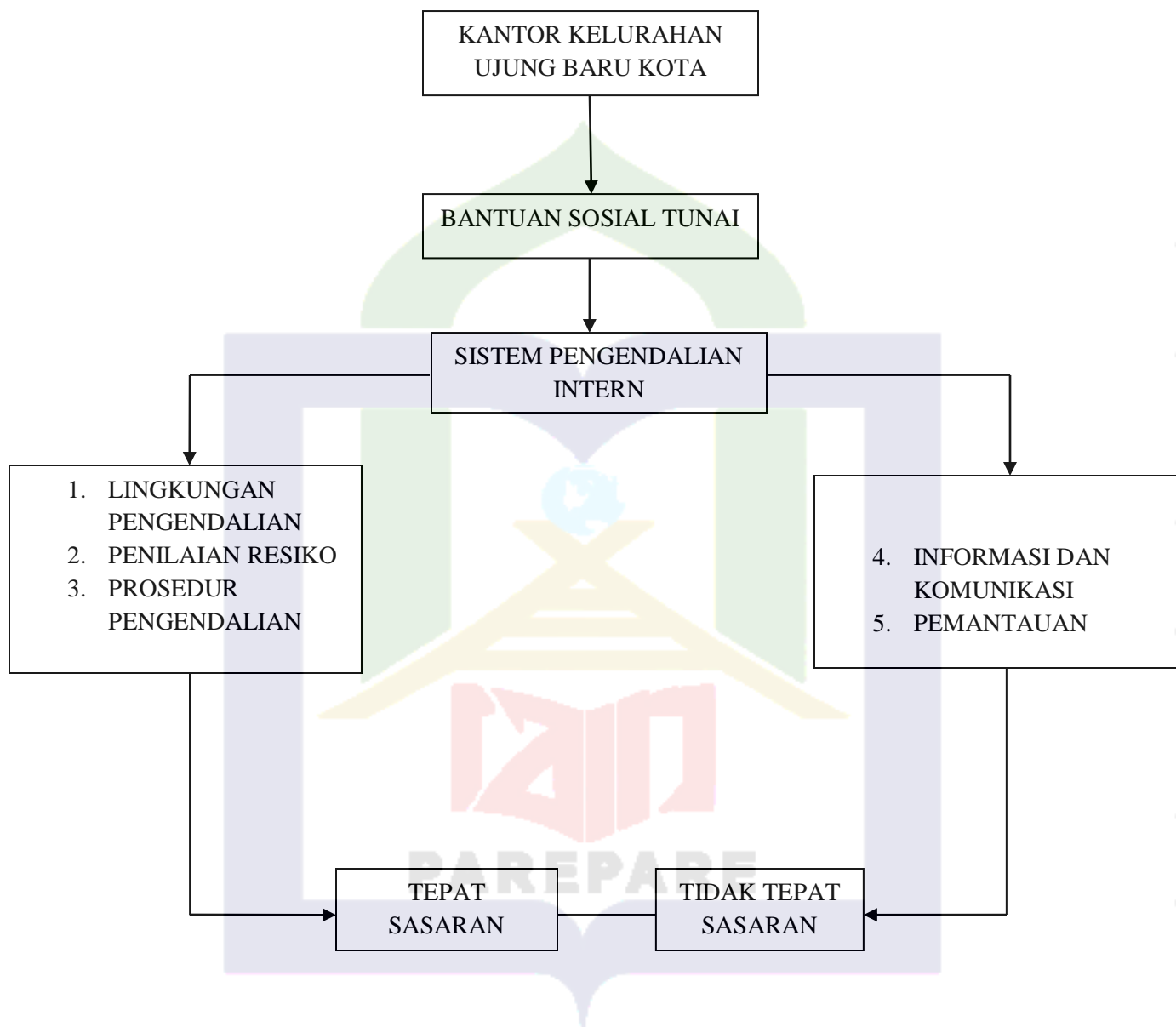
Adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisien dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

2. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan sosial tunai adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Besaran Bantuan Sosial Tunai adalah senilai Rp.600.000,-/keluarga/bulan. Bantuan Sosial Tunai ini merupakan program jaringan pengaman sosial kementerian sosial yang diperuntukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19. Program ini merupakan bantuan penugasan khusus presiden. Bantuan Sosial untuk wilayah jabodetabek diberikan dalam bentuk sembako. Pemberian bantuan BST, tidak termasuk penerima bantuan Program keluarga Harapan (PKH), Kartu sembako, dan kartu pra kerja.

¹⁸Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020.

D. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Bagan kerangka berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana dengan cara seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tujuannya mendapatkan pemahaman secara mendalam tentang masalah-masalah sosial dan bukan mendeskripsikan sebagai permukaan dari suatu realitas.²⁰ Serta menurut Denzim dan Licion bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.²¹

Melihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait masalah yang diteliti secara keseluruhan dan melibatkan beberapa metode dalam proses penelitiannya . penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif agar dapat memahami fenomena yang menjadi subjek penelitian dan memaparkan informasi dari hasil pengolahan datanya dalam bentuk deskriptif.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan sistematis menggunakan data-data yang *diperoleh*di

¹⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1997), h. 42.

²⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 85.

²¹Djama'an Satori dan Aan Komaria, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 24.

lapangan.²² Seluruh data di ambil dalam proses pencarian data di lapangan di Kantor kelurahan ujung baru kota parepare data tersebut data yang berhubungan dengan subjek yang di teliti yaitu Sistem Pengendalian Intern Bantuan Sosial Tunai Di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah dari penelitian yang berlangsung.²³ Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Kelurahan Ujung baru Kota Parepare yang beralamat di Jl.H Jamil Ismail Lorong Keadilan N0. 1 Kota Parepare

Penelitian ini akan berlangsung selama kurang lebih satu bulan, penelitian dilakukan setelah peneliti melakukan seminar proposal

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pembatasan studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan. Pembatasan ini dimaksudkan agar peneliti dapat memilih data yang ada dilapangan berdasarkan urgensinya dan juga kebaruan informasi yang didapat mengingat banyaknya data yang kemungkinan diperoleh di lapangan.

Adapun fokus penelitian ini yaitu penelitian difokuskan pada sistem pengendalian internal masyarakat terdampak yang layak menerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Peneliti akan mengkaji tentang bagaimana sistem pengendalian intern terhadap penerima bantuan sosial di Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare.

²²Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995), h. 58.

²³Sukardi, *Metodelogi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT . Bumi Aksara, 2008), h. 53.

3. Jenis dan Sumber Data

Data adalah segala informasi yang diolah dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan.²⁴

Sumber data pada penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder, demikian juga dengan jenis data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder.

- a. Data primer merupakan data yang telah diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penelitian memperoleh data primer dengan menggunakan instrumen penelitian yang telah ditetapkan, data primer ini lebih akurat karena diperoleh langsung dari sumber pertama yang merupakan subjek penelitian sehingga menjadikan data primer ini lebih terperinci. Dalam penelitian data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumbernya
- b. Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk karena telah diolah oleh pihak lain data skunder ini biasanya dalam bentuk publikasi. Sumber data skunder ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sehingga siap digunakan, data dalam bentuk statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau pihak lain yang berhubungan dengan penggunaan data.²⁵ Dalam penelitian ini data skunder diperoleh dari lembaga yang menjadi subjek penelitian seperti data yang ada di kantor kelurahan ujung baru Kota Parepare, dokumen, arsip, dan juga data dari pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁴Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 124.

²⁵Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 113.

B. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan instrumen penting yang dapat mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber, *setting*, dan berbagai cara.²⁶ Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian digunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan sistematis terkait fenomena yang akan diteliti. Dalam teknik observasi, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung.²⁷ Observasi merupakan teknik yang memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Sustrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila subjek pengamatan tidak terlalu besar.²⁸

2. Wawancara

Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui percakapan untuk memperoleh informasi tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pewawancara yaitu pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan pewawancara.²⁹ Wawancara merupakan suatu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 137

²⁷Suharisimi Akrikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 83.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, h. 145

²⁹Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 186.

Wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan agar dapat menemukan permasalahan yang akan diteliti serta saat peneliti ingin meneliti subjek penelitian secara mendalam dengan responden yang sedikit.³⁰

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang garis besar pertanyaannya telah disusun oleh peneliti dan memungkinkan adanya pertanyaan baru yang muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Kepala Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare dan para pegawai yang bersangkutan dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³¹ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.³² Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian baik berupa sumber tertulis, dokumen, dan gambar (foto).

C. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan metode digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan data dan menjadikannya data yang sistematis akurat dan mudah dipahami dan relevan dengan subjek penelitian. Adapun tahap pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

³⁰Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cetb III, 2007), h. 216.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* h. 240.

³²M. Iqbal Sukmadinata, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghia Indonesia, 2002),h. 87.

1. Pemeriksaan data (*Edditing*)

Pemeriksaan data adalah tahap meneliti data-data yang telah diperoleh, misalnya kelengkapan jawaban, keteraturan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian data dan relevansinya data merupakan langkah pengolahan data pertama yang dilakukan peneliti dengan memeriksa data hasil wawancara dengan narasumber.³³

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap klasifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh baik data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara maupun data hasil dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam, dan kemudian digolongkan berdasarkan jenisnya atau sesuai kebutuhan.³⁴ Proses klasifikasi ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih mudah dipahami serta data yang diperoleh mudah dipelajari, dan dibandingkan antara data satu dengan data yang lain.

3. Verifikasi (*Classifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh di lapangan agar validasi data dapat diakui dan dapat digunakan dalam penelitian.³⁵ Dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan verifikasi mandiri selanjutnya peneliti akan memperlihatkan data yang telah dikumpulkan kepada subjek penelitian untuk menjamin bahwa data sebelumnya yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.

³³Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

³⁴Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 1993), h. 105.

³⁵Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84

4. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan adalah tahap terakhir dari pengolahan data, dalam penelitian ini penelitian membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh data yang disimpulkan merupakan hasil dari proses pengolahan data sebelumnya yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.

D. Uji keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif, data yang diperoleh dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti, jadi uji multi keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *creadibility*, *transferability*, *depanabilty*, dan *confirmability*.³⁶

1. Kepercayaan (*creadibility*)

Uji kepercayaan atau uji keredabilitas dilakukan untuk membuktikan data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan, dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan wawancara ulang dengan narasumber dengan begitu hubungan peneliti dengan narasumber semakin terbentuk, semakin akrab dan saling mempercayai sehingga informasi yang dapat diperoleh lebih maksimal dengan begitu maka akan terbentuk kewajaran dalam penelitian yang dilakukan.
2. Peningkatan ketekunan dalam penelitian, meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan

³⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, h. 269

dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat diperoleh secara sistematis dan akurat.

3. Triangulasi, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.
4. Hasil diskusi dengan teman dan *membercheck*, *membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.³⁷

2. Uji *Transferability*

Transferability merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukkan derajat ketepatan. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian maka penelitian dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.³⁸

3. Uji *Depenability* (Reabilitas)

Dalam penelitian kealitatif, uji *depenability* atau disebut juga reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangiproses penelitian tersebut uji *depenability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.³⁹

³⁷Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* h. 178.

³⁸Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* h. 276.

³⁹Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, h. 277

4. Uji *Confirmability*

Uji *Confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan.⁴⁰

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pencandraan (*Description*) seta penyusunan data dan informasi yang telah terkumpul. Tujuannya adalah agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas terkait apa yang ditemukan dan diperoleh di lapangan.⁴¹

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, tujuan dari analisis ini yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Analisis dilakukan setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian telah terkumpul seluruhnya. Dalam proses analisis penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, diantaranya sebagai berikut:⁴²

⁴⁰Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* h. 277

⁴¹Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Persentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humsniora* (Bandung: Pustaka Setia. 2012), h. 37.

⁴²Miles, Matthew B., “ *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*/Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 1992, h. 15.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan metode pengolahan data sesuai dengan instrumen yang telah dipilih oleh peneliti untuk menentukan fokus dan pendalaman pada proses penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mengolongkan, mengarahkan, mengorganisasikan, menghapus yang tidak diperlukan serta mengolah data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan dan verifikasi akhir.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyajikan data dengan mengelompokan data yang telah direduksi ini dilakukan dengan menggunakan label dan semacamnya.⁴³

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang paling akhir yang dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.⁴⁴ Pengumpulan data pada tahap awal menghasilkan kesimpulan sementara yang masih memerlukan verifikasi yang dapat menguatkan kesimpulan atau bahkan dapat menghasilkan kesimpulan baru, kesimpulan ini dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan, kesimpulan dapat berkembang sewaktu-waktu sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.

⁴³Imron Rosidi, *Kary Tulis Ilmiah*, (Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011), h. 26.

⁴⁴Imron Rosidi, *Karya Tulis Ilmiah*, h. 26.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumen untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian tentang Sistem pengendalian intern bantuan sosial tunai di kelurahan ujung baru kota parepare, format penulis hasil penelitian merujuk pada rumusan masala. Temuan penelitian dijelaskan di bawah ini tergantung pada topik penelitian dan masalah yang diteliti.

Berikut paparan hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah yang diteliti.

A. Bagaimana pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di kelurahan ujung baru kota parepare

Selama pandemi ini berlangsung telah memberikan dampak buruk bagi prokonomian di karenakan juga adanya pembatasan kegiatan masyarakat, daya beli masyarakat menurun dan kebijakan yang pemerintah keluarkan yaitu PPKM/PSBB menyebabkan kegiatan masyarakat terbatas, namun kebijakan tersebut semata mata hanya untuk melindungi masyarakat agar tidak terjangkin Covid-19 dan juga memutuskan mata rantai penyebaran virus tersebut

Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran PPKM pada 6 juli 2021 Nomor surat 060/44/GT.Covid19 tentang perpanjangan perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Parepare dengan adanya kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah kota Parepare yang memberikan dampak yang baik untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 dan juga menjaga masyarakat agar tidak terkena virus tersebut namun kebijakan dan dampak dari pandemi memberikan dampak yang

sangat kurang baik bagi masyarakat khususnya pada masyarakat kalangan kurang mampu. Seluruh aktifitas prokonomian mengalami penurunan yang signifikan terus menerus sehingga menimbulkan dampak yang kurang baik.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di kota parepare pada sasaran sektor prekonomian mengalami kendala karena adanya pandemi Covid-19 dan aturan pemerintah yang memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di indonesia terutama di kota parepare. Kebijakan PPKM memberikan dampak yang baik untuk pencegahan penyebaran Covid-19, tapi berdampak kurang baik bagi masyarakat. melalui program Bantuan Sosial Tunai pemerintahan diharapkan dapat memberikan dampak yang baik pada sektor prekonomian masyarakat.

Menanggapi hal ini pemerintah berupaya melakuakn program pemulihan bagi masyarakat terdampak pandemi yang mengalami penurunan pendapatan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Menanggapi hal ini Kementrian Dinas Sosial mengeluarkan sebuah program pemberdayaan bagi masyarakat terdampak pandemi, program tersebut merupakan Bantuan Sosial Tunai (BST). Dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai Kementrian dinas sosial mengamanahkan kepada setiap pemerintah daerah khususnya pada kelurahan ujung baru kota parepare yang berperan memberikan pelayanan publik dalam pelaksanaan program BST dari hasil observasi dan wawancara yang di lakukan peneliti mencoba menggambarkan seperti apa proses pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai di kelurahan ujung baru kota parepare.

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan secara efektif dan

efisien. Pergerakan merupakan kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang lain suka dan dapat bekerja.

Adapula beberapa pelaksanaan menurut para ahli:

- a. Hersey dan Blanchard mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan untuk menumbuhkan situasi secara langsung dapat mengerahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri kepada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan⁴⁵.
- b. Georgri R Terry pelaksanaan sebagai usaha untuk mengerakan anggota kelompok dengan berbagai cara sehigga berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran yang bersangkutan sehingga tergerak untuk mencapai sasaran itu⁴⁶.

Sebagai pihak pelaksanaan pelayanan publik kelurahan menerapkan fungsi-fungsi pelaksanaan:

- a. Untuk mempengaruhi seseorang (orang-orang) supaya bersedia menjadi pengikut
- b. Melunakan daya resistensi pada sesorang atau orang-orang
- c. Untuk membuat sesorang atau orang-orang suka untuk mengerjakan tugas dengan baik
- d. Untuk mendapatkan serta memelihara dan memupuk kesetian, kesayangan, kecintaan kepada pimpinan, tugas serta organisasi tempat mereka bekerja.

⁴⁵ Nana Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Falah Production 2004), hlm. 115

⁴⁶Georgi R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Askara, 2014), hlm.17

- e. Untuk menanamkan rasa tanggung jawab secara penuh pada orang-orang terhadap tuhan, negara, serta tugas yang diembannya⁴⁷

2. Sosialisai

Sosialisai merupakan suatu upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisai Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan proses atau usaha untuk menyebarluaskan informasi tentang Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat supaya masyarakat bisa lebih tahu dan mengenal tentang peran Kelurahan. Kelurahan melakukan sosialisasi berdasarkan kebutuhannya.

sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Suriyana S. SOS. :

“Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan tatap muka yang sesuai dengan protokol kesehatan. Pada sosialisasi tatap muka juga dilaksanakan sesuai dengan permintaan dari lurah sosialisasi ini dilakukan untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 dan berhak menerima bantuan sosial tunai⁴⁸”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa sosialisasi dilakukan semata-mata hanya untuk mendeteksi masyarakat yang terdampak pandemi dan memberi pengetahuan kepada masyarakat terkait syarat penerimaan Bantuan Sosial Tunai dan memberi arahan sesuai dengan protokol administrasi Bantuan Sosial Tunai yang telah ditetapkan oleh pihak kelurahan Ujung Baru Kota Parepare sebagaimana yang telah disebutkan pada latar belakang masalah yaitu pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang NO.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

⁴⁷Georgi R Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Askara, 2013), hlm. 17

⁴⁸Suryana S.SOS, penanggung Jawab Bantuan Sosial Tunai, *Wawancara* di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 09 Oktober 2022

3. Pendataan

Pendataan yang merupakan proses pencatatan yang benar dan juga nyata pihak kelurahan melakukan pendataan masyarakat terdampak yang mengalami penurunan pendapatan dan termasuk dalam kategori masyarakat yang kurang mampu, dengan menanggapi informasi dari RT/RW sebagai pihak yang memahasi situasi dan kondisi dari masyarakat sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Suryana S. SOS,:

“merespon usulan yang ada krna RT/RW yang merupakan instrumen pemerintahan yang paling dekat dan paling sering berbaur dengan masyarakat kami melalui informasi yang di sampaikan kami merspon dengan mendatangi calon penerima dan melakukan pendataan sesuai dengan aturan yang ada⁴⁹”

Dari hasil wawancara tersebut pihak kelurahan yang melakukan pendataan dengan merespon informasi mengenai warga yang ada dan kemudia melakukan pendataan tentunya sekaligus melakukan survei apakah kondisi dari calon penerima tersebut sudah sesuai dengan informasi yang ada lalu kemudia melalukan pendataan bagi masyarakat terbut yang sesuai dengan kondisi calon penerima dan untuk mencegah adanya kecurangan yang terjadi pihak pendataan dari kelurahan akan menyampaikan informasi kepada RT/RW dan menkomfirmasi persetujuan tentang warga yang telah di tetapkan sebagai calon penerima agar pendataan tersebut bersifat transparan sehingga dapat menanggulangi terjadinya sebuah kecurangan yang ada dalam proses pendataan.

⁴⁹ Suryana S.SOS, penanggung Jawab Bantuan Sosial Tunai, *Wawancara* di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kots Parepare, 09 Oktober 2022

4. Penetapan

Penetapan merupakan proses penentuan calon penerima bantuan sosial kelurahan mempertimbangkan dan mengevaluasi calon penerima dengan memastikan penerima mengalami penurunan pendapatan dan juga tidak terdaftar pada jenis program bantuan lainnya. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan ibu Saniwati sebagai ketua RT9:

“penetapan dilakukan kelurahan dengan mempertimbangan usulan dari RT/RW krna kami yang paham betul mengenai situasi warga yang ada, warga pertamakali menyampaikan keluhan memalui RT kemudia kami sampaikanlah usulan warga kami yang membutuhkan bantuan dari pemerintah yang kemudia usulan tersebut akan di proses oleh pihak kelurahan yang bertanggung jawab mengenai program bantuan tersebut dan melakukan survei ulang untuk memastikan layak tidaknya calon penerima bantuan tersebut di tetapkan sebagai warga yang berhak menerima bantuan⁵⁰”

Dari hasil wawancara tersebut pihak kelurahaan sebagai yang bertanggung jawab dalam proses penyaluran program bantuan tetap melakukan evaluasi ulang dari usulan RT/RW yang ada hal ini di lakukan untuk mengurangi resiko terjadinya kecurangan dalam proses penetapan penerimaan Bantuan Sosial tunai pihak kelurahan terus mempertimbangkan resiko yang ada kemudia melakukan tindakan pencegahan guna menyukseskan program bantuan agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

5. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses agar tujuan organisasi dan manajemen bisa tercapai. Cara agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan agar sesuai degan tujuan dan prinsip-prinsip yang telah di

⁵⁰Sanawati Ketua RT9, *Wawancara* di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 09 Oktober 2022

gariskan. Dalam suatu kebijakan perlu dilakukan pengawasan agar pelaksanaannya dapat terkontrol dan mengurangi tingkat resistensi.

Pihak kelurahan mengawasi tiap tahap dalam proses penyaluran bantuan sosial BST mulai dari pendataan sampai proses penyaluran/penerimaan Bantuan Sosial Tunai⁵¹. Wawancara dengan Ibu Suryana, S. SOS

“tentu kami melakukan pengawasan baik dari segi pendataan, sosialisasi, hingga penyaluran hal ini guna menanggulangi agar tidak terjadinya kecurangan dan bagi calon penerima bantuan kami juga rutin melakukan komunikasi dengan mereka dan memberikan berbagai edukasi serta pemahaman terkait Bantuan Sosial Tunai hal ini dilakukan agar dapat berjalan lancar sesuai dengan yang di harapkan”

Dalam proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) penyaluran BST yang berlokasi di Kantor Pos Kota Parepare di Jl. Karaeng Burane No.1 Mallusetasi Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91111.

Setelah sosialisasi yang dilakukan yang bertujuan memberi pemahaman dan juga edukasi kepada masyarakat penerima bantuan dan memberikan arahan yang sesuai dengan prosedur yang kemudian di arahkan ke Kantor Pos kota Parepare pihak kelurahan juga melakukan pengawasan sekaligus pengawalan bagi masyarakat penerima BST dan melakukan dokumentasi. Wawancara dengan Ibu Suryana S. SOS⁵²

“hal ini bertujuan agar selama proses penerimaan berjalan lancar dan juga kami sebagai pihak pendataan bertanggung jawab agar masyarakat yang terdata layak menerim bantuan sampai ketangan mereka dan merupakan tanggung jawab agar bantuan yang di berikan sampai tepat ke tangan mereka karna itulah sangat penting melakukan pengawasan dan pendataan serta dokumentasi dan juga komunikasi yang di

⁵¹Agustiono Tachjan, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung:Alfabeta, 2006), h. 31

⁵²Suryana S.SOS, penanggung Jawab Bantuan Sosial Tunai, *Wawancara* di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kots Parepare, 09 Oktober 2022

lakukang dengan penerima sebaga acuan tepat atau tidaknya sasaran penerimaan bantuan sosial tunai.”

Hasil wawancara Kelurahan menyebarkan informasi mengenai adanya program bantuan BST melalui sosialisasi yang dilakukan dan bekerja sama dengan RT/RW untuk memberikan informasi kepada para masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan

Peroses penyaluran bantuan, pemerintah juga bekerjasama dengan Kantor Pos kota Parepare dimana kantor Pos nantinya bertugas untuk menyalurkan langsung ke calon penerima yang memenuhi syarat yang telah di tetapkan dengan di dampingi oleh pihak dari kelurahan yang dilakukan dengan beberapa yang terlibat dalam proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan observasi di lapangan dapat di simpulkan bahwa dari yang peneliti wawancarai sudah menggambarkan proses penyaluran yang sesuai dengan ketentuan yang ada dan memiliki keadilan. Keadilan yang merupakan pondasi dasar dalam penyalurahn program bantuan dilaksanakan dengan memelihara hakikat keadilan, tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan dan pengambilan kesempatan pada saat pihak lain sedang kesempatan. Hakikat ini juga berarti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan pekerjaan yang dilakukan⁵³. Sehingga tidak menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah ini, dapat dilihat bahwa sebagai penyedia pelayanan publik kelurahan ujung baru di kota Parepare berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kelurahan ujung baru melakukan berbagai macam model pelayanan publik agar pembagian dan kegiatan pemberdayaan tersebut merata kepada masyarakat kurang mampu yang

⁵³Neneng Nurhasanah. *Mudharabah dalam teori dan praktik*. H. 18.

tedampak pandemi yang berhak menerima bantuan, sehingga dalam hal ini upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan bisa dibilang adil sehingga tidak bertentangan dengan perspektif ekonomi islam.

Kelurahan tetap bertanggung jawab sebagai pihak yang mengatur dan menjaga data penerima bantuan yang layak, hal ini demi menjaga stabilitas prekonomian dengan melakukan berbagai bentuk pemberdayaan.

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab dapat di kelompokkan dalam dua hal yang pertama merupakan, tanggung jawab individu terdapat dirinya pribadi. Dia harus bertanggung jawab terhadap akal(pikiran) nya, ilmu, raga, harta, waktu dan kehidupannya secara umum.

B. Bagaimana sistem pengendalian intern Bantuan Sosial Tunai (BST) di kelurahan ujung baru kota parepare

Sistem pengendalian intern Bantuan Sosial Tunai kelurahan ujung baru kota parepare dalam penyaluran program BST menggunakan dua data yang pertama merupakan data langsung dari Kementerian dinas sosial. merupakan data warga tidak mampu yang telah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai penerima. Sebagaimana hasil wawancara dan pernyataan dari ibu suryana

“Bantuan ada banyak salah satunya BST yang berupa uang tunai yang merupakan bantuan yang terdata langsung dari pusat kementerian sosial dan untuk selebihnya di berikan ke kelurahan memsukan data-data warga yang kami usulkan untuk menerima bantuan BST”

Berdasarkan wawancara dan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam Data yang kedua merupakan usulan dari pihak kelurahan yang diberikan langsung amanah oleh kementerian Dinas sosial untuk mendeteksi masyarakat yang

terdampak pandemi Covid-19 dan masyarakat tidak mampu yang belum pernah tersentuh program bantuan seperti program bantuan BLT, PKH dan BPNT. agar tidak terjadi adanya data yang tumpang tindih dan penumpukan penerima bantuan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak pandemi khususnya pada sektor prekonomian di Indonesia.

Sistem pengendalian intern Bantuan Sosial Tunai di Kantor kelurahan ujung baru kota parepare dalam melakukan penentuan target penerima bantuan memperhatikan berbagai faktor penilaian seperti

- a) Jenis pekerjaan
- b) Jumlah pendapatan perbulan
- c) Mengalami penurunan pendapatan
- d) Tidak terdaftar program bantuan lain

Adapun faktor yang yang mempengaruhi penetapan target Bantuan Sosial Tunai (BST) yaitu realisasi pendapatan dan potensi pendapatan masyarakat. Untuk mendukung sistem pengendalian intern Bantuan Sosial Tunai di kelurahan ujung baru kota parepare Data yang bersumber dari kelurahan yang melakukan proses pendataan ulang bagi masyarakat yang belum pernah tersentuh program bantuan pemerintah. Data laporan dapat dilihat sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	NOMOR BARKOT	BESAR UANG
1	M WALI AMRI	JL. A MAKKASAU NO 164	BST73720044021000011	600.000

2	TAUFIKSYAWA LADHA	JL. A MAKKASAU TIMUR	BST73720091127506031	600.000
3	YOSEPKALUA	JL. A MAKKASAU TIMUR	BST73720312031000011	600.000
4	INDRAWATI	JL A MAKKASAU TIMUR LR KEADILAN	BST73722034107800001	600.000
5	ABD GANING	JL. A MAKKASAU TIMUR	BST73720238117601425	600.000
6	AMRULLAH	JL. A MAKKASAU TIMUR	BST73710323087000321	600.000
7	BAHARUDDIN HAMID	JL. A MAKASSAU TIMUR	BST73720320085000571	600.000
8	BUNATI	JL. A MAKKASAU TIMUR	BST73720371125801351	600.000
9	FARID IRWANDI	JL. A MAKKASAU TIMUR	BST73720373008800011	600.000
10	I DALLE	JL. A MAKKASAU TIMUR	BST73720542087100011	600.000

11	MURSIDIN	JL. A MAKKASAU TIMUR	BST73730904094400021	600.000
12	RAHMA SABAN	JL. A MAKKASAU TIMUR	BST70720326097400041	600.000
13	RATNADEWID	JL. A MAKKASAU TIMUR	BST73720347077900091	600.000
14	SUANTING SUMARNI	JL. A MAKKASAU TIMUR LR MASPUL	BST73720086075200021	600.000
15	SURYANI	JL. A MAKKASAU TIMUR LR MASPUL	BST73720571128001271	600.000
16	NAHRIA	JL. A SINTA	BST73720071108400011	600.000
17	EMMY NURJIHAT	JL. A SINTA NO 6 A	BST73720351029400021	600.000

18	AMALIA AMRI	JL. A SINTA SELATAN	BST73720349098500031	600.000
19	YASIR AL JIBRAN	JL. ANDI SINTA SELATAN	BST73720311118300081	600.000
20	MUH YUSUF	JL. MU ARSYAD NO 6 A	BST73720329058000021	600.000
21	TANTI	JL. A MAKKASAU TIMUR	BST73715048507630031	600.000

Table di atas data menunjukkan masyarakat yang terdaftar sebagai masyarakat tidak mampu yang tidak terdaftar jenis program bantuan lain. penerima program bantuan sosial dengan nominal Rp. 600.000/bulan dengan bantuan dana yang diberikan kementerian dinas sosial yang telah terdata di kelurahan setelah melakukan wawancara dengan ibu gustiawati. SE:

“Untuk proses pendataan program bantuan ini kami melakukan proses pengecekan ulang data masyarakat ujung baru yang tergolong tidak mampu dan belum pernah tersentuh bantuan sosial lainnya. Dan ada juga data usulan dari RT/RW yang paham betul kondisiarganya siapa saja yang layak bisa diusulkan sebagai penerima karena tidak bisa di pungkiri keadaan status sosial masyarakat berubah ubah sebagai pihak kelurahan sangat terbantu pula dengan usulan yang diberikan oleh RT/RW terkait kondisi masyarakat dan juga untuk memperkuat layak tidak juga melakukan survei kepada warga usulan yang di berikan RT/RW untuk

memperjelas latar belakangnya lalu diberikan pemahaman terkait jenis bantuan yang akan mereka terima”⁵⁴

dalam data table di atas juga di jalankan menggunakan prinsip akuntansi syariah dalam pendataannya yaitu :

- a. Prinsip pertanggung jawaban dalam hal ini kelurahan menerapkan dengan melakukan pertanggung jawaban berupa laporan penerimaan bantuan yang akan di jadikan arsip pertanggung jawaban. Setiap penerima bantuan sosial dilakukan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan target penerima dan realisasinya
- b. Prinsip keadilan dimana kelurahan ujung baru menerapkan prinsip ini dalam melakukan penerimaan bantuan sosial tunai berupa pencatatan yang dilakukan secara adil sesuai dengan kondisi dan keadaan yang terjadi
- c. Prinsip kebenaran diterapkan di kelurahan ujung baru di lihat saat pihak kelurahan secara rutin melakukan survei kepada penerima yang terdata agar terhindar dari kecurangan.

Hasil di atas kita dapat mengetahui bahwa pemerintah memberikan syarat syarat tertentu agar bantuan di salurkan dengan tepat ke orang yang memang membutuhkan bantuan tersebut, dimana pemerintah memberikan bantuan kepada warga negara Indonesia(WNI) dan berdomisili di parepare, memiliki KTP sehingga dengan begitu bantuan pemerintah lebih terarah dan adil. Dan berikut data usulan warga dari RT/RW:

⁵⁴Gustiawati S.E , Kasi Kesejahteraan Rakyat, *Wawancara* di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 10 Oktober 2022

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	RW
1	RAHMA	JL. BELIBIS	IRT	RW 6
2	A ATIWARDA	JL. JEND .A YANI	BURU CUCI	RW 6
3	AHMAD	JL. BELIBIS	BURUH LEPAS	RW 6
4	SURIANTI NURDIN	JL. BELIBIS	IRT	RW 6
5	AMRULLAH	JL. A MAKKASAU TIMUR	TUKANG OJEK	RW 7
6	RATNA DEWI	JL. A MAKKASAU TIMUR	IRT	RW 7
7	MUHAMMAD ASRUL	JL. ABU BAKAR LAMBOGO	WIRASUASTA	RW 8

8	ISANANG	JL. ABUBAKAR LAMBOGO LORONG MASPUL	WIRUSAHA	RW 8
---	---------	--	----------	------

Table di atas menjelaskan bahwa kelurahan ujung baru kota parepare berhasil merealisasikan pendataan bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19.

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pegendalian merupakan salah satu unsur dari sistem penegndalian intern yang berfokus pada bagaimana suatu lingkungan pengendalian yang ada pada perusahaan atau dinas pemerintah mengatur integritas dan etika, komunikasi sesuai dengan kesesuaian posisi pegawai dengan kompetensi yang dipunyai, dan juga pembilnaan sumber daya manusia yang ada.

1) Penegakan nilai integritas dan etika

Kedisiplinan merupakan salah satu contoh penerapan nilai integritas dan etika yang di terapkan agar penerimaan BST berjalan dengan baik dan juga efektif. Sesuai dengan wawancara dengan salah satu narasumber ibu gustiawati S.E :

“salah satu upaya pimpinan dalam yaitu dengan melaksanakan interaksi yang baik dengan pimpinan yang mewajibkan pegawai tepat waktu sesuai dengan sif kerja masing-masing begitupula dengan bagian lapangan”

2) Pembentukan struktur organisasi

Struktur organisasi yang digunakan kelurahan ujung baru kota parepare berpedoman pada praturan daerah walikota parepare Nomor 35 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas serta fungsi tata kerja Sekretariat daerah.

Fungsi dalam melakukan penyusunan wewenang serta tanggung jawab yang dilampirkan dalam struktur organisasi yang digunakan mengacu pada struktur organisasi garis dan staf yang terstruktur yang merupakan struktur organisasi pemberian tugas dan wewenang melalui pimpinan yang di teruskan kepada sekretariat dan kepada sub bidang masing-masing. Yang sesuai dengan teori V. Wiratha Sujarweni bahwa struktur organisasi baik adalah struktur organisasi yang dapat memisahkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas sehingga tidak terjadi kecurangan seperti rangkap jabatan.

3) Wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Pembagian tugas penyaluran BST kelurahan ujung baru kota parepare memebrikan tugas yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugasnya yang sesuai sehingga wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian nampak dengan jelas.

4) Peran pengawasan intern yang efektif

Peran pengawwasan yang pengendalian intern yang efektif dimana kelurahan ujung baru secara terus menerus menerapkan sistem monitoring atau pengawwasan berkala oleh pimpinan dan juga bawahannya yang kemudia dilakukan review dan koreksi terhadap laporan apa bila terjadi kesalahan laporan penerimaan bantuan sosial tunai dan realisasi dilakukuan selama tahap penyaluran bantuan sosial tunai seseuai dengan wawancara yang di lakukang dengan ibu suryana S.SOS

“Dalam pengawasan internal ibu lura melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penerimaan bantuan sosial tunai dan realisasinya di lakukan tiap tahap penerimaan bantuan⁵⁵”

⁵⁵Suryana S.SOS, penanggung Jawab Bantuan Sosial Tunai, *Wawancara* di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kots Parepare, 10 Oktober 2022

b. Penilaian resiko

Penilaian resiko merupakan penilaian yang dilakukan berdasarkan resiko yang benar-benar ada dalam sebuah perusahaan maupun badan dinas negara. Agar dapat benar-benar mengetahui resiko yang perlu dilakukan penilaian resiko terhadap manajemen.

Penilaian resiko yang dilakukan oleh kelurahan ujung baru kota parepare mengacuh pada tepat sasaranannya penerima program Bantuan Sosial Tunai (BST) dimana adanya strategi yang ditetapkan untuk menghadapi resiko yang ada. Kelurahan ujung baru kota parepare mempelajari dan menemukan solusi agar tidak terjadinya resiko yang tidak di inginkan dengan melakukan mencari sumber penyebab adanya resiko salah data dengan mengidentifikasi resiko maka dapat pula diketahui seberapa besar dampak yang di timbulkan telah di atursangsinya adapun tindakan yang dilakukan sebagai upaya atau pencegahan dan pengendalian resiko dengan melakukan evaluasi pendataan masyarakat terdampak pandemi yang memenuhi syarat sebagai penerima yang di lakukan secara rutin dan berskala selama berjalannya program bantuan sosial tunai. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Suryana S.SOS:

“Untuk kebijakan agar resiko dapat diminimalisir maka dilakukan penomoran dokumen dan juga dokumentasi hal ini sangat penting dalam pengendalian resiko agar tidak ada terjadi adanya kecurangan dalam pendataan penerima bantuan sosial tunai⁵⁶”

Kelurahan ujung baru kota parepare mencari solusi agar dapat mengendalikan resiko. Dengan cara memahami resiko, sehingga dapat mengambil sebuah tindakan pencegahan, sehingga tidak terjadi kerugian yang besar ada dua resiko yang dihadapi yaitu:

⁵⁶Suryana S.SOS, penanggung Jawab Bantuan Sosial Tunai, *Wawancara* di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kots Parepare, 10 Oktober 2022

- 1) Resiko strategi yaitu resiko karyawan melakukan kesalahan karena krna melakukan pekerjaan yang salah salah satu contohnya pengimputan yang harusnya di kerjakan dengan menggunakan komputer/laptop dilakukan dengan cara manual
- 2) Resiko informasi merupakan adanya informasi yang tidak relevan atau bahkan salah. Salah satu contohnya salah satu karyawan memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan syarat penerima bantuan yang menyebabkan adanya keluhan yang di berikan oleh warga.

Hal ini telah sejalan dengan teori Mardiasmo pengendalian dalam penilaian resiko sangat dibutuhkan. Hal ini menandakan bahwa kelurahan ujung baru kota parepare telah melakukan penilaian resiko yang baik dalam pengendalian internnya.

c. Prosedur pengendalian

Merupakan sebuah kebijakan yang membantu memberikan arahan prosedur pengendalian ini diadakan dalam sistem pendataan masyarakat dari segi pencatatan, pembatasan sumber data dan pemisahan tugas berdasarkan fungsi.

Prosedur pengendalian yang dilakukan kelurahan ujung baru kota parepare melakukan review kinerja dengan melakukan evaluasi yang dilakukan secara berkala selama berjalannya program bantuan dalam setiap tahan pencairan bantuan sosial. Review kinerja dilakukan dalam bentuk rapat-rapat dengan menilai kinerja pegawai. Pemisahan tugas juga mendukung sistem pengendalian intern karna ada keterangan jelas yang disusun dengan job description merupakan acuan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab, dokumen dan catatan yang memadai. Sehingga mendukung jalannya pencatatan.

Kelurahan ujung baru kota parepare melakukan otorisasi yang memadahi, pemisahan tugas, serta dokumen dan catatan yang memadahi dengan otoritas yang memadahi maka diharapkan penerimaan bantuan sosial yang sesuai dengan targetnya. Berdasarkan data serta keterangan yang ada di atas maka prosedur pengendalian telah mendukung sistem pengendalian

d. Informasi dan komunikasi

Hasil penelitian yang didapatkan pada proses penerimaan Bantuan Sosial Tunai (BST) menggunakan komputer. Mulai dari pencatatan data penerima menghitung jumlah nominal yang diterima dan pembuatan laporan. Dinas atau perusahaan telah menggunakan informasi dan komunikasi yang baik untuk mendukung sistem pengendalian intern dengan pemanfaatan teknologi dan alur komunikasi.

Berdasarkan yang di sampaikan oleh HJ. Andi Nurpati, SKM selaku Lurah

“terkait banyaknya tuntutan masyarakat terkait pelayanan maka kami menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang di mulai adanya web, serta pelayanan online dan bahkan laporan online dengan adanya sistem pelayanan online masalah komunikasi dengan pemberian arahan secara langsung seperti pemberian surat tugas kepada anggota untuk melaksanakan tugas kepada anggota untuk melaksanakan tugas dimana informasi di sampaikan oleh pimpinan tertinggi hingga sampai ke bawwahnya”

Kelurahan ujung baru kota parepare telah sesuai dengan sistem pengendalian intern dengan cara menerapkan alur komunikasi yang baik dengan pegawai dan juga pimpinan serta masyarakat secara luas, kelurahan ujung baru kota parepare juga dalam pencatatan telah menggunakan teknologi yang memadahi.

Berdasarkan penjelasan yang ada dapat disimpulkan kelurahan ujung baru kota parepare demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat memanfaatkan

“selama pandemi ini dek susah keadaan apalagi saya bergantung sama anakji juga itupun kerjaannya cuman tukang ojek yang dulu sebelum pandemi

kadang dapat penumpang 5-10 orang tapi selama pandemi kadang seharian keliling tidak dapat penumpang belum kebutuhan rumah juga”⁵⁷

pengunaan teknologi yang berkembang dan sistem informasi yang digunakan juga telah memadai.

e. Pemantauan

Kelurahan ujung baru kota parepare melakukan evaluasi dalam bentuk rapat-rapat evaluasi yang dilakukan pada setiap pencairan/penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BST) menurut Ibu Gustiawati, SE

“pemantauan dilakukan setiap tahap pencairan bantuan sosial tunai dan sekaligus memberikan bantuan arahan kepada masyarakat agar memahami prosedur yang harus di lakukan selama proses penerimaan dana Bantuan Sosial Tunai (BST)”⁵⁸

Wawancara yang dilakukan dengan Pak Muh asrul

“sebagai tukang ojek dek biasa pendapatan dari penumpang seharian keliling masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah merasakan sekali dampak dari pandemi ini apalagi PPKM semua aktifitas di batasi yang akibatnya dampaknya penumpang jadi makin kurang mana lagi kebutuhan untuk anak sekolah yang pembelajaran secara online juga harus di penuhi kebutuhannya”⁵⁹

Wawancara yang dilakukang dengan Ibu Ratna dewi

“sebagai penjahit yang biasanya pendapatan dari buat baju kebaya pengantin, permak baju sekolah, permak baju dinas, merasakan sekali dampak dari pandemi ini apalagi PPKM yang dilakukan pemerintah seperti dilarangnya diadakan acara pengantin (kerumunan) dan sekolah melakukan pembelajaran secara online, kantor kantor yang menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH) yang otomatis orang jadi jarang memakai seragam kantor/sekolahnya sehingga pendapatan saya sebagai penjahit menurun dari Rp. 450.000 – 800,000/bulan menurun sampai Rp. 230. 000/bulan”⁶⁰

⁵⁷Isanang, Penerima Bantuan Sosial Tunai, di RW8 Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 15 Oktober 2022

⁵⁸Gustiawati S.E , Kasi Kesejahteraan Rakyat, *Wawancara* di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 10 Oktober 2022

⁵⁹Asrul, Penerima Bantuan Sosial Tunai, *wawancara* di RW8 Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 15 Oktober 2022

⁶⁰Suryanti Nurdin , Penerima Bantuan Sosial Tunai, *Wawancara* di RW8 Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 15 Oktober 2022

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Suryanti Nurdin

“suami saya sebagai pegawai bagian pembiayaan dek sangat merasakan dampak dari pandemi terlebih lagi aktivitasi yang di batasi dengan kebijakan PPKM ini jadi sulit mendapatkan nasaba apalagi keadaan prekonomian yang kurang baik banyak nasabah yang telat melakukan pembayaran yang dampaknya di rasakan oleh suami saya terkadang menutipi pembayaran nasabah yang terlambat”

Wawancara yang dilakukang dengan Pak Amrullah

“sebagai tukang ojek saya sangat merasakan dampak dari pandemi ini dimana sangat sulit mendapatkan penumpang terlebih lagi adanya kebijakan PPKM dan juga adanya virus Covid-19 ini yang membuat kami menjadi waswas tiap kali bekerja. Dan pendapatan yang juga menurun sangat derastis dan kebutuhan yang makin meningkat contohnya untuk anak sekolah yang melakukan pembelajaran secara daring yang tentunya membutuhkan kuota internet⁶¹”

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu A. Atiwarda

“sebagai seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh cuci saya juga sangat merasakan dampak dari pandemi Covid-19 ini terlebih lagi kebutuhan yang makin meningkat sedangkan sebagai buruh cuci yang hanya di upah Rp. 20.000/30.000 di mana selama pandemi job sebagai buruh cuci jadi makin berkurang apalagi kebutuhan anak sekolah yang juga meningkat karna pembelajaran secara daring dek apalagi hanya saya seorang diri yang menafkahi 7orang anak karna suami saya sudah lama meninggal yang tadinya sebelum pandemi dalam sebulan job mencuci pakaian bisa 2-5 perhari namun selama pandemi sehari hanya 2-3 bahkan cukup sering tidak ada panggilan sama sekali”⁶²

Wawacara yang dilakukan dengan Ibu Rahma

“suami yang hanya sebagai tukang ojek dek tentu saja sangat merasakan juga dampak dari pandemi Covid-19 ini di samping penumpang yang sangat sepi yang kadang sehari tidak mendapatkan satu penumpang sama sekali di sisi lain kebutuhan yang makin meningkan baik dari sisi anak sekolah dan kebutuhan rumah bahkan harga BBM yang meningkat”⁶³

Wawancara yang dilakukan dengan Pak Ahmad

“sebagai seorang buruh lepas dek saya sangat merasakan dampak dari pandemi ini yang bisa di bilang bukan main main. Panggilan job yang sepi yang bahkan dalam sebulan tidak ada panggilan satupun di sisilain sebagai kepala rumah tangga ada anak dan istri yang harus di nafkahi dan kebutuhan

⁶¹ Amirullah, Penerima Bantuan Sosial Tunai, wawancara di RW7 kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 15 Oktober 2022

⁶²A. Atiwarda, Penerima Bantuan Sosial Tunai wawanca, di RW6 Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 15 Oktober 2022

⁶³Rahma, Penerima Bantuan Sosial Tunai, di RW6 Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 15 Oktober 2022

yang juga meningkat tentu saja sangat merasakan dampaknya yang biasanya dalam sebulan saya bisa mendapatkan Rp. 200.000/450.000 namun selama pandemi bahkan terkadang tidak ada sama sekali”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penemiliter dengan beberapa warga dari kelurahan ujung baru kota parepare, dapat di simpulkan bahwa kebijakan PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah semata mata untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 tetapi di balik kebijakan ada pihak yang mengalami kerugian dimana PPKM membatasi jam oprasional, dilarangnya kerumunan serta banyaknya masyarakat takut keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar rumah.

Pemerintah juga melakukan beberapa tindakan langsung sebagai tahap guna membantu masyarakat agar bisa selamat dari krisis yang terjadi akibat pandemi yaitu bantuan sosial tunai yang dilakukan melalui pendataan warga melalui kelurahan baik dari data awal maupun data tambahan dan juga kordinasi melalui pemangku kepemimpinan guna membantu para warga terdampak pandemi COVID-19 dapat di simpulkan masyarakat mengalami kerugian karna adanya pandemi juga adanya kebijakan yang pemerintah keluarkan yaitu PPKM dan pandemi yang terjadi membuat masyarakat menjerit akan krisis yang mereka alami yang membuat merka mengalami penurunan pendapatan yang drastis dan membuat beberapa harga bahan pokok mengalami kenaikan harga.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa warga/masyarakat terdampak kelurahan ujung baru kota parepare dan observasi dilapangan dapat di simpulkan bahwa beberapa warga yang peneliti wawancarai masih ada beberapa yang merasa belum mendapatkan beberapa bantuan sosial lainnya yang tidak hanya berupa uang tunai namun juga berupa sembako dan sejenisnya sehingga merasa tidak ada

⁶⁴Ahmad, Penerima Bantuan Sosial Tunai, di RW6 Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 15 Oktober 2022

keadilan. Upaya dari pemerintah ini, dapat dilihat bahwa sebagian warga terdampak di kelurahan ujung baru kota parepare masih ada beberapa yang merasa perlu mendapatkan bentuk bantuan lain dari pemerintah, padahal berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pihak pemerintah daerah melakukan berbagai macam model untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa penerima yang telah terdaftar bantuan sosial tunai tidak dapat terdaftar program bantuan lain untuk menghindari terjadinya data yang tumpang tindih dan pembagian bantuan dapat merata agar tidak terjadi penerima bantuan yang mendapatkan bantuan lebih banyak dari yang lainnya. Sehingga menyebabkan adanya kesalahpahaman yang terjadi di beberapa kalangan masyarakat upaya pemerintah daerah kota parepare hanya memberikan penjelasan kepada penerima bantuan sosial tunai sehingga masyarakat yang terdaftar pada program bantuan lain mengalami kesalahpahaman dalam hal ini upaya pemerintah daerah dalam hal memberi pemahaman kepada masyarakat bisa di bilang tidak adil sehingga itu bertentangan dengan prinsip ekonomi islam.

Hal ini didasarkan dalam QS. Al – Maidah/ 5 : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اٰعْدِلُوْا هُوَ اٰقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى وَاْتَقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian mu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepad atakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁶⁵

⁶⁵Al-Qir'an Kementrian Agama Ri. 2022, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an),Al-Maidah5 : 8

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Tanggung jawab manusia kepada orang lain dan lingkungan sosial dimana ia hidup. Kita ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya untuk pengembangan dirinya.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu harus menerapkan hakikat tanggung jawab. Di dalam kerja sama tanggung jawab adalah hal yang paling utama untuk para pelaku kerja sama.

Hal ini di dasarkan pada QS Al Isra Ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ لِكُلٍّ أَلْبَسْنَا عَنْهُمْ سُوْرًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya.”⁶⁶

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengendalian dan prosedur penerimaan bantuan sosial tunai (BST) dan dilakukan kelurahan ujung baru kota parepare sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada dan memiliki sistem pengendalian intern yang baik sehingga potensi adanya kecurangan yang terjadi sangat kecil.

⁶⁶Al-Qir'an Kementerian Agama Ri. 2022, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), Al-Isra Ayat 36

Elemen Sistem Pengendalian intern	Evaluasi	Keterangan
Lingkungan pengendalian	Sudah Sesuai	Pemisahan tugas sehingga wewenang dan tanggung jawab jelas, mengatur kedisiplinan karyawan, penegakan, menjaga komunikasi yang intensif dengan pimpinan
Penilaian risiko	Sudah Sesuai	Arsip dan dokumentasi yang baik terhadap dokumen penting Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare
Prosedur pengendalian	Sudah Sesuai	Adanya otoritas yang memadai, pemisahan tugas, serta dokumen dan catatan yang memadai. Karna proses pendataan sudah menggunakan Teknologi yang sesuai maka ada nomor urut serta yang telah terekam dalam sistem dan merupakan bukti dokumen yang sah.

Informasi dan komunikasi	Sudah Sesuai	Dibutuhkan komunikasi yang efektif untuk membangun komunikasi yang efektif tentunya komunikasi yang juga perlu dibangun antara masyarakat dan kelurahan agar penerimaan informasi terkait penerimaan BST dapat berjalan dengan optimal
Pemantauan	Sudah Sesuai	Terdapat akuntansi pertanggung jawaban yang baik dan terdapat bidang yang bertugas untuk mengevaluasi dan pengendalian terhadap penerimaan BST

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan analisis dan evaluasi mengenai sistem pengendalian intern bantuan sosial tunai(BST) di kantor kelurahan ujung baru kota parepare, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandemi COVID-19 membuat aktifitas prekonomian masyarakat kota parepare terbatas, akibat pandemi daya beli masyarakat mengalami penurunan yang drastis. Pandemi yang terjadi membuat pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu PPKM yang dimana seluruh aktifitas mulai dari jam oprasional, pembatasan pengunjung, di tetapkan pemerintah untuk melindungi masyarakat dan menghentikan penyebaran virus COVID-19, namun kebijakan tersebut memberikan dampak yang kurang baik terhadap masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu karna dengan adanya kebijakan PPKM kegiatan prekonomian masyarakat jadi terbatas sehingga membuat masyarakat mengalami penurunan pendapatan yang signifikan
2. Pemerintah berupaya dalam memperdayakan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 kementrian dinas sosial mengeluarkan program bantuan sosial tunai yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi. Kelurahan sebagai pihak pelayanan publik memiliki peran penting dalam proses penyaluran bantuan sosial tunai. Kelurahan ujung baru kota parepare berperan sebagai pihak yang mendata dan medeteksi masyarakat terdampak yang kurang mampu. Kelurahan ujung baru kota parepare dalam proses pendataan menggunakan sistem survei dan memberi

edukasi dan pengetahuan bagi calon penerima bantuan terkait BST dan apa saja yang harus di lengkapi oleh calon penerima dalam sistem pengendalian intern bantuan sosial tunai(BST) sebagai media informasi kepada dinas sosial mengenai layaknya masyarakat sebagai penerima bantuan sosial.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam melakukan proses pendataan program bantuan pemerintah
2. Meningkatkan SDM yang ada dengan melakukan evaluasi kinerja lebih sering
3. Meningkatkan sistem pengendalian intern yang mulai baik
4. Memberi reward kepada pegawai yang memiliki kualifikasi kinerja yang baik dan terus meningkat setiap tahunnya
5. Melakukan validasi data untuk mengecek dan mengamankan data penerima bantuan

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al- Karim

- Achmadi, Abu dan Narkubo.Cholid, 2005.*Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharismi, *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995)
- Damin. Sudarman , *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Persentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humsniora* (Bandung: Pustaka Setia. 2012)
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)
- Hery, *Pengantar Akuntansi* (Indonesia: Gramedia Widiasarana, 2015)
- J Moeleong . Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020.
- Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* (Jakarta: Erlangga, 2013)
- Kurniawan, “*Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Kota*
- Miles, Matthew B., “ *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru/Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi*”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992)
- Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: Selemba Empat, 2013)
- Mutmainnah Indah Suci, “*Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Biaya Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Parepare*” (*Skripsi Sarjana: Jurusan Akuntansi* 2019)
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002)
- Rosidi. Imron, *Karya tulis ilmiah*, Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011)
- Satori, Djama'an dan Aan Komaria, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017)

- St. Syahrini, “Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh Kementerian Sosial RI Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Kabupaten Takalar”, Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, th2021
- St.Syahrini, “Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Oleh Kementerian Sosial RI Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Takalar” (*Skripsi Sarjana: Jurusan Ilmu Pemerintahan makassar 2021*)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sukardi, *Metodelogi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT . Bumi Aksara, 2008)
- Sukmadinata . M. Iqbal, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghia Indonesia, 2002)
- Sunggono. Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1997)
- Syaodih . Nana Sukmadinta, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cetb III, 2007)
- Undang-undang Republik Indonesia No.25 tahun2009, Tentang Pelayanan Publik
- Georgi R Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*,(Jakarta: Bumi Askara, 2013), hlm. 17
- Suryana S.SOS, penanggung Jawab Bantuan Sosial Tunai, *Wawancara* di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kots Parepare, 09 Oktober 2022
- Sanawati Ketua RT9, *Wawancara* di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 09 Oktober 2022
- Agustiono Tachjan, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung:Alfabeta, 2006), h. 31 Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta :Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).
- Gustiawati S.E , Kasi Kesejahteraan Rakyat, *Wawancara* di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 10 Oktober 2022
- Isanang, Penerima Bantuan Sosial Tunai, di RW8 Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 15 Oktober 2022
- Asrul, Penerima Bantuan Sosial Tunai, *wawancara* di RW8 Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 15 Oktober 2022

Suryanti Nurdin , Penerima Bantuan Sosial Tunai, *Wawancara* di RW8 Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 15 Oktober 2022

Amirullah, Penerima Bantuan Sosial Tunai, *wawancara* di RW7 kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 15 Oktober 2022

Atiwarda, Penerima Bantuan Sosial Tunai *wawanca*, di RW6 Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 15 Oktober 2022

Rahma, Penerima Bantuan Sosial Tunai, di RW6 Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 15 Oktober 2022

Ahmad, Penerima Bantuan Sosial Tunai, di RW6 Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 15 Oktober 2022



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1: Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MUH ALIF RAHMAN NUR
NIM : 18.2800.048
PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUDUL : SISTEM PENGENDALIAN BANTUAN SOSIAL
TUNAI DI KANTOR KELURAHAN UJUNG BARU KOTA PAREPARE.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian Sistem Pengendalian Bantuan Sosial Tunai di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare.

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun pertanyaan pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut :

Wawancara Untuk Pegawai Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare

Identitas Informan

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Umur :
- d. Pekerjaan :

C. Daftar Pertanyaan

b. Lingkungan pengendalian

- Apakah dalam penggunaan anggaran menerapkan Prinsip Pertanggungjawaban dimana tidak terdapat aspek riba dalam prosesnya?
- Apakah ada aturan atau kebijakan terkait penegakan integritas/kode etik dan aturan untuk pihak yang bersangkutan dalam menerima bantuan sosial tunai dikelurahan ujung baru kota parepare? Jika ada dalam bentuk seperti apa?
- Apakah penyerahan tugas/jabatan kepada pegawai/ pihak yang bersangkutan sudah sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya dalam menerima bantuan sosial tunai di kelurahan ujung baru kota parepare
- Apakah seluruh pegawai yang terlibat, selalu melaksanakan interaksi atau komunikasi yang intensif dengan pimpinan?

c. Penilaian resiko

- Apakah ada evaluasi dari kejadian yang lalu untuk digunakan sebagai perbandingan/ukuran kinerja periode bersangkutan dalam proses

penerimaan bantuan sosial tunai?

- Apakah ada kebijakan atau ketetapan untuk mengidentifikasi berbagai macam resiko dalam proses penerimaan bantuan sosial tunai?
- Apakah resiko yang telah diidentifikasi tersebut telah diukur dampak yang akan ditimbulkan dalam proses penerimaan bantuan sosial tunai? Dan apakah sudah ada tindakan pencegahan / pengendalian terhadap resiko tersebut?

d. Prosedur pengendalian

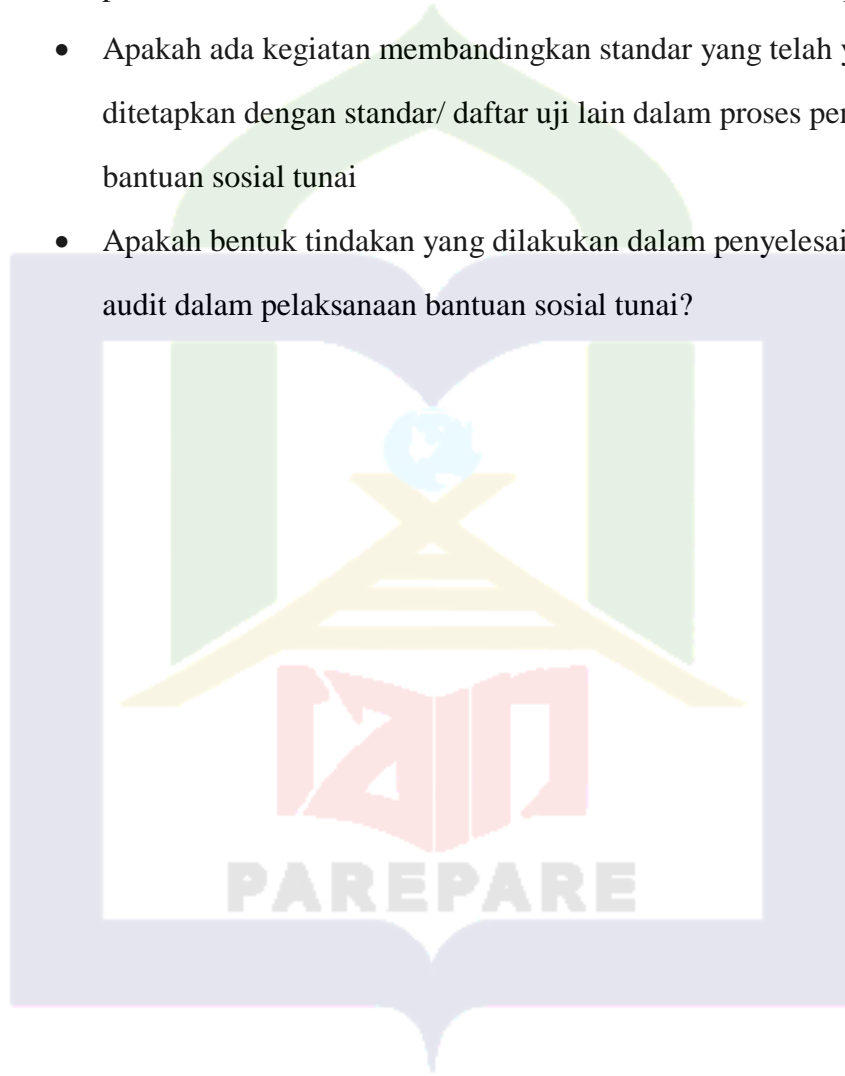
- Apakah dalam pembinaan sumber daya mulai dari disiplin kerja sampai dengan penilaian kinerja dan pengembangan kemampuan sudah ditetapkan? Jika ada dalam bentuk apa?
- Apakah ada review laporan kinerja dan tolak ukur yang ditetapkan dalam proses penerimaan bantuan sosial tunai?
- Apakah ada kebijakan dalam pengelolaan aset maupun penggunaan aset dinas dalam kegiatan proses penerimaan bantuan sosial tunai?

e. Informasi dan komunikasi

- Apakah pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas/kegiatan penerimaan bantuan sosial tunai sudah memanfaatkan sarana komunikasi yang efektif?
- Apakah ada kebijakan yang mengatur tentang penggunaan sarana komunikasi pihak yang bertanggung jawab tersebut dalam melakukan pelaporan dan pelaksanaan bantuan sosial tunai?
- Apakah ada manajemen informasi untuk pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penerimaan bantuan sosial tunai?

f. Pemantauan

- Apakah ada kebijakan yang mengatur tentang pemantauan kinerja atas kegiatan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penerimaan bantuan sosial tunai? Jika ada dalam bentuk apa?
- Apakah ada kegiatan membandingkan standar yang telah ditetapkan dengan standar/ daftar uji lain dalam proses penerimaan bantuan sosial tunai
- Apakah bentuk tindakan yang dilakukan dalam penyelesaian temuan audit dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai?



Lampiran 2: Surat Izin Melaksanakan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 6 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3452/In.39.8/PP.00.9/08/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUH ALIF RAHMAN NUR
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE 02 JANUARI 2001
NIM : 18.2800.048
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : JL. ABU BAKAR LAMBOGO NO. 68, KELURAHAN
UJUNG BARU, KECAMATAN SOREANG, KOTA
PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN BANTUAN SOSIAL TUNAI DI KANTOR
KELURAHAN UJUNG BARU KOTA PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan
terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.


22 Agustus 2022
Dekan,



Prof. Dr. H. Hafid Muhammadun

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare

SRN IP0000664


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan Nomor 28 Telp (0421) 23394 Fax (0421) 27319 Kode Pos 91111. Email : apm@pkipareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 665/IP/DPM-PTSP/8/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : MUHAMMAD ALIF RAHMAN NUR

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**
Jurusan : **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

ALAMAT : **JL. ABU BAKAR LAMBOGO NO. 68, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **SISTEM PENGENDALIAN INTERN BANTUAN SOSIAL TUNAI DI KANTOR KELURAHAN UJUNG BARU KOTA PAREPARE**


LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE (KELURAHAN UJUNG BARU)**

LAMA PENELITIAN : **26 Agustus 2022 s.d 26 Oktober 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **29 Agustus 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE


HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina (IV/a)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

PAREPARE

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah diarsipkan secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSE**

• Dokumen ini dapat diaktakan keabsahannya dengan terdaftar di database **DPPPTSP** Kota Parepare (scan QRCode)



Lampiran 4: SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2284/In.39.8/PP.00.9/7/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

22 Juli 2021

Yth: **1. Dr. Hannani, M.Ag.** (Pembimbing Utama)
2. Abdul Hamid, S.E., M.M. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Muhammad Alif Rahman Nur
NIM. : 18.2800.048
Prodi. : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Tanggal **22 Juni 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN BIAYA BST (BANTUAN SOSIAL TUNAI) DI
KANTOR KELURAHAN UJUNG BARU KOTA PAREPARE**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan,

Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip

Daftar Penerima Bantuan



Wawancara dengan penerima bantuan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *RATNA DEWI*
Alamat : *JL. A. MAKKASAU TIMUR*
Jenis kelamin : *PEREMPUAN*
Pekerjaan : *IRT*

Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Alif Rahman Nur
NIM : 18.2800.048
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Sistem Pengendalian Intern Bantuan Sosial Tunai di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare, 14 - 09

2020

Ratna Dewi
(.....*RATNA DEWI*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

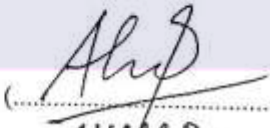
Nama : AHMAD
Alamat : JL. BELI BIS
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : BARIAN LEPAS

Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Alif Rahman Nur
NIM : 18.2800.048
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Sistem Pengendalian Intern Bantuan Sosial Tunai di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 2020

(.....)
AHMAD.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Isanang
Alamat : Jln abubakar lambago lorong masjid
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wirausaha

Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Alif Rahman Nur
NIM : 18.2800.048
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Sistem Pengendalian Intern Bantuan Sosial Tunai di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE Parepare

2020

Isanang

(.....Isanang.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : muhammad asru
Alamat : Abu Bakar Lambogo
Jenis kelamin : laki-laki
Pekerjaan : wiraswasta

Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Alif Rahman Nur
NIM : 18.2800.048
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Sistem Pengendalian Intern Bantuan Sosial Tunai di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare

2020


(.....muhammad asru!.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *AMRULLAH.*
Alamat : *JL. A. MAKASSAU TIMUR.*
Jenis kelamin : *LAKILARI*
Pekerjaan : *TUKANG OJEK.*

Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Alif Rahman Nur
NIM : 18.2800.048
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Sistem Pengendalian Intern Bantuan Sosial Tunai di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 2020

Amrullah
(.....AMRULLAH.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Surianti Nurdin

Alamat : Jl. Belibis

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : IP-T

Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Alif Rahman Nur


NIM : 18.2800.048

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Sistem Pengendalian Intern Bantuan Sosial Tunai di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 14 September 2020


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : A. ATIWAHKAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani km 1
Jenis kelamin : perempuan
Pekerjaan : Buruh cuci

Menerangkan bahwa


Nama : Muhammad Alif Rahman Nur
NIM : 18.2800.048
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Sistem Pengendalian Intern Bantuan Sosial Tunai di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare

2020


(.....)
A-ATIWAQHKAH

Lampiran 6: Surat Keterangan Telah Meneliti





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG
KELURAHAN UJUNG BARU**

Jalan H. Jamil Ismail No. 08 Parepare, Telp (0421)7007515
Kode Pos 91132, Email : ujungbaru@pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100/ 324 /UJUNG BARU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **HJ. ANDI NURPATI, SKM**
Jabatan : **LURAH UJUNG BARU**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : **MUH. ALIF RAHMAN NUR**
NIM : **18.2800.048**
Jurusan : **Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah**
Perguruan Tinggi : **Institut Agama Islam Negeri Parepare**

Adalah benar telah melakukan penelitian pada Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare terhitung mulai pada tanggal 31 Agustus 2022 s/d 28 Oktober 2022 untuk memperoleh data deskriptik kualitatif dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

**"SISTEM PENGENDALIAN INTERN BANTUAN SOSIAL TUNAI DI KANTOR
KELURAHAN UJUNG BARU KOTA PAREPARE"**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Desember 2022



HJ. ANDI NURPATI, SKM
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19780620 200312 2 007



BIODATA PENULIS

Muhammad Alif Rahman Nur lahir di parepare, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 02 Januari 2001. Penulis lahir dari pasangan Muh Nur dan Harmini dan merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara. Pada tahun 2006 memasuki Sekolah Dasar (SD) DDI Ujung Lare dan lulus pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan sekolah di sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 kota parepare dan lulus tiga tahun kemudian pada tahun 2015. Selanjutnya tahun 2015 penulis melanjutkan sekolah di sekolah menengah atas (SMA) Negeri 4 Pindrang pada tahun 2018. Penulis di terima menjadi mahasiswa program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah di Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare melalui jalur UMPTKIN. Dengan segala doa, dukungan dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Sistem Pengendalian Intern Bantuan Sosial Tunai di Kantor Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare” penulis bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.